



Katalog BPS: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2014



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA FEBRUARI 2014



Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia Februari 2014

ISSN. 2088.5679

No. Publikasi: 04120.1406

Katalog BPS: 2302004

Ukuran Buku: 29,5 cm X 21,5 cm

Jumlah Halaman: xvi + 104 halaman

Naskah: Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik RI

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode 2005-2010 dilaksanakan secara semesteran dan sejak Februari 2011 dilaksanakan secara triwulanan. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara lebih cepat dan berkesinambungan. Sakernas Triwulan I, II, dan IV menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus selain terdiri dari 50.000 rumah tangga sampel Triwulan III, juga terdapat 150.000 rumah tangga sampel tambahan/komplemen sehingga mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan *series Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Triwulan III (Agustus), Triwulan IV (November) tahun 2013, dan Triwulan I (Februari) tahun 2014. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, Juni 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin
NIP. 19560805 197903 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	viii
Daftar Lampiran	ix
Daftar Istilah dan Singkatan (Akronim)	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
1. Pendahuluan	1
1.1. Sakernas dan Analisis Ketenagakerjaan	1
1.2. Sakernas dan KILM	2
1.3. Peran KILM di Bidang Ketenagakerjaan	4
1.4. Analisis Pasar Tenaga Kerja Menggunakan KILM	6
2. Penjelasan Teknis	9
2.1. Penjelasan Umum	9
2.2. Indikator Kunci Pasar Tenaga Kerja	12
2.2.1. Partisipasi di Dunia Kerja	13
2.2.2. Indikator Penduduk yang Bekerja	14
2.2.3. Indikator Pengangguran, Setengah Pengangguran (<i>Underemployment</i>), dan Ketidakaktifan	18
2.2.4. Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	21
2.2.5. Indikator Upah dan Biaya Tenaga Kerja	22
2.2.6. Produktivitas Tenaga Kerja	22
2.2.7. Indikator Elastisitas Tenaga Kerja	23
2.2.8. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan	23
3. Partisipasi dalam Dunia Kerja (KILM 1)	25
KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	25
4. Indikator Tenaga Kerja (KILM 2-7)	29
4.1. KILM 2. Rasio Penduduk Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (<i>Employment to Population Ratio-EPR</i>)	29
4.2. KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	33
4.3. KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha	37

4.4.	KILM 5. Pekerja Paruh Waktu	41
4.5.	KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja	45
4.6.	KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal	49
5.	Indikator Pengangguran	53
5.1.	KILM 8. Pengangguran	53
5.2.	KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda	56
5.3.	KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan	59
5.4.	KILM 12. Setengah Penganggur (<i>Underemployment</i>)	64
5.5.	KILM 13. Tingkat Ketidaktifan	68
6.	Indikator Pendidikan dan Melek Huruf	71
	KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf	71
	LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2013–2014 (persen)	26
Tabel 2.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013–2014 (dalam juta)	30
Tabel 3.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013–2014	31
Tabel 4.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam juta)	34
Tabel 5.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014	35
Tabel 6.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam juta)	38
Tabel 7.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014	39
Tabel 8.	Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2013–2014 (persen)	42
Tabel 9.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013–2014	46
Tabel 10.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013–2014 (dalam juta)	50
Tabel 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013–2014	50
Tabel 12.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013–2014 (persen)	53
Tabel 13.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013–2014	57
Tabel 14.	TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014 (persen)	60
Tabel 15.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014	62
Tabel 16.	Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2013–2014 (dalam juta)	64
Tabel 17.	Indikator Setengah Penganggur, 2013–2014	65
Tabel 18.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014	67
Tabel 19.	Indikator Ketidakaktifan, 2013–2014 (persen)	68
Tabel 20.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014	72

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, November 2013 dan Februari 2014 (persen)	27
Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)	28
Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, November 2013 dan Februari 2014	32
Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014	32
Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014	36
Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, November 2013 dan Februari 2014	40
Grafik 7. <i>Share</i> Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)	43
Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)	44
Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2014	48
Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, November 2013 dan Februari 2014	52
Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Februari 2014	52
Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)	54
Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari 2014	63
Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, November 2013 dan Februari 2014	66
Grafik 15. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, November 2013 dan Februari 2014 (persen)	70
Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, November 2013 dan Februari 2014	73
Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari 2014	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam ribu).....	77
Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013–2014 (dalam juta).....	78
Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam ribu)	79
Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, 2013–2014 (dalam juta)	80
Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (persen).....	81
Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam ribu)	82
Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014	83
Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013–2014.....	84
Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013–2014	86
Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013–2014	87
Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013–2014	88
Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013–2014	91
Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (persen).....	92
Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014 (persen).....	93
Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014....	94

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014.....	95
Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi, 2013–2014 (dalam ribu)	96
Lampiran 18. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (persen) ...	97
Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014..	98
Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (rupiah)	99
Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2013–2014 (rupiah).....	100
Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (rupiah)	101
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2013–2014 (rupiah)	102
Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama	103

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 mencapai 125,32 juta orang, secara absolut naik sebanyak 580 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan November 2013 (124,74 juta orang) dan naik sebanyak 5,15 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2013 (120,17 juta orang).

Persentase TPAK mengalami kenaikan tipis dari 69,08 persen pada November 2013 menjadi 69,17 persen pada Februari 2014, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Februari 2014 naik sebesar 0,09 persen poin. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, TPAK Februari 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 2,40 persen poin.

Secara nasional, angka EPR pada Februari 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan November 2013, yaitu meningkat tipis sebesar 0,07 poin dari angka 65,16 menjadi 65,23 pada Februari 2014 ini. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2014. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, EPR Februari 2014 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,57 poin dari angka 62,66.

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Februari 2014 ini polanya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan periode sebelumnya (Agustus dan November 2013), dimana persentase terbesar diduduki penduduk bekerja dengan status berusaha, diikuti dengan penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, dan urutan terakhir diduduki penduduk bekerja dengan status pengusaha. Pada periode November 2013–Februari 2014, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen poin, dan untuk penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen poin.

Hasil Sakernas Februari 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,68 persen, urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 34,56 persen, dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,76 persen.

Pada Februari 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,34 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 22 orang yang bekerja kurang

dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin dibandingkan dengan keadaan November 2013 (22,98 persen), serta mengalami penurunan sebesar 1,37 persen poin jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 (23,71 persen). Hasil Sakernas Februari 2014 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,02 persen dan 15,63 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Februari 2014 mencapai 33,47 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen poin jika dibandingkan dengan November 2013 (33,36 persen), namun mengalami penurunan sebesar 6,30 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 (39,77 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 pada Tabel 10, menunjukkan bahwa dari 118,17 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,59 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (63,33 juta orang). Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2013 sebesar 53,03 persen, naik menjadi 53,77 persen pada November 2013,

namun turun pada Februari 2014 menjadi 53,59 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Agustus 2013 mencapai 46,97 persen, turun menjadi 46,23 persen pada November 2013, dan naik pada Februari 2014 hingga mencapai 46,41 persen.

TPT pada Februari 2014 sebesar 5,70 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Februari 2014, menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami sedikit fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan November maupun Agustus 2013. TPT pada Februari 2014 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 persen poin bila dibandingkan November 2013 (5,76 persen), tetapi turun sebesar 0,47 persen poin dibandingkan Agustus 2013 (6,17 persen).

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 17,05 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. Angka tersebut turun baik bila dibandingkan dengan hasil Sakernas November maupun Agustus 2013, dengan penurunan masing-masing sebesar 2,19 persen poin dan 4,53 persen poin.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah

menengah yaitu sebesar 8,42 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,53 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Februari 2014, mencapai 10,57 juta orang, yang terdiri dari 6,35 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 4,22 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Februari 2014, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 7,06 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,51 juta orang.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 30,83 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,83 persen.

Hasil Sakernas Agustus, November 2013, dan Februari 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan November 2013, tingkat ketidakaktifan pada Februari 2014 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 turun sebesar 2,40 persen poin. Meski terjadi penurunan tingkat

ketidakaktifan (Sakernas November 2013 dan Februari 2014), akan tetapi jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja mengalami sedikit kenaikan, yaitu sebanyak 20 ribu orang dari 55,83 juta orang pada November 2013 menjadi 55,85 juta orang pada Februari 2014.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada November 2013. Angkatan kerja pada Februari 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 59,76 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,98 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 10,03 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,23 persen

1. PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia, Badan Pusat Statistik, sejak Triwulan

I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan,

tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu; bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan

Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Selama periode Februari 2011–Februari 2014, Sakernas dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan jumlah sampel sekitar 50.000 rumah tangga (Sakernas triwulanan) dan 200.000 rumah tangga (Sakernas Agustus). Untuk Sakernas Agustus, jumlah sampel tersebar pada 20.000 blok sensus di seluruh provinsi, baik di daerah

perkotaan maupun perdesaan. Dari 20.000 blok sensus tersebut, diantaranya 5.000 blok sensus adalah sampel Sakernas Triwulan III dan 15.000 blok sensus merupakan sampel Sakernas tambahan. Penambahan jumlah sampel ini bertujuan untuk memperoleh estimasi data hingga tingkat kabupaten/kota. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun keatas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pemakai data dalam menginterpretasi dan menganalisa data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Estimasi ketenagakerjaan Februari 2014 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk. Sedangkan Agustus–November 2013 merupakan hasil *backcasting* dari

penimbang Proyeksi Penduduk yang digunakan pada Februari 2014.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan

bentuknya ringkas/sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musimannya.

Mengingat bahwa sejak tahun 2011 Sakernas telah dilakukan secara triwulanan, dengan maksud sebagai *early warning system* di bidang ketenagakerjaan, maka perlu disusun rangkaian indikator ketenagakerjaan dengan memanfaatkan data Sakernas tersebut. Penyusunan indikator pasar tenaga kerja

(KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisa informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi

pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak"

untuk segala bentuk kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain.

Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang

produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk menghadapi era

globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta

perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak

aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga, pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan,

misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisa apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat

terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional. Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja

dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

2. PENJELASAN TEKNIS

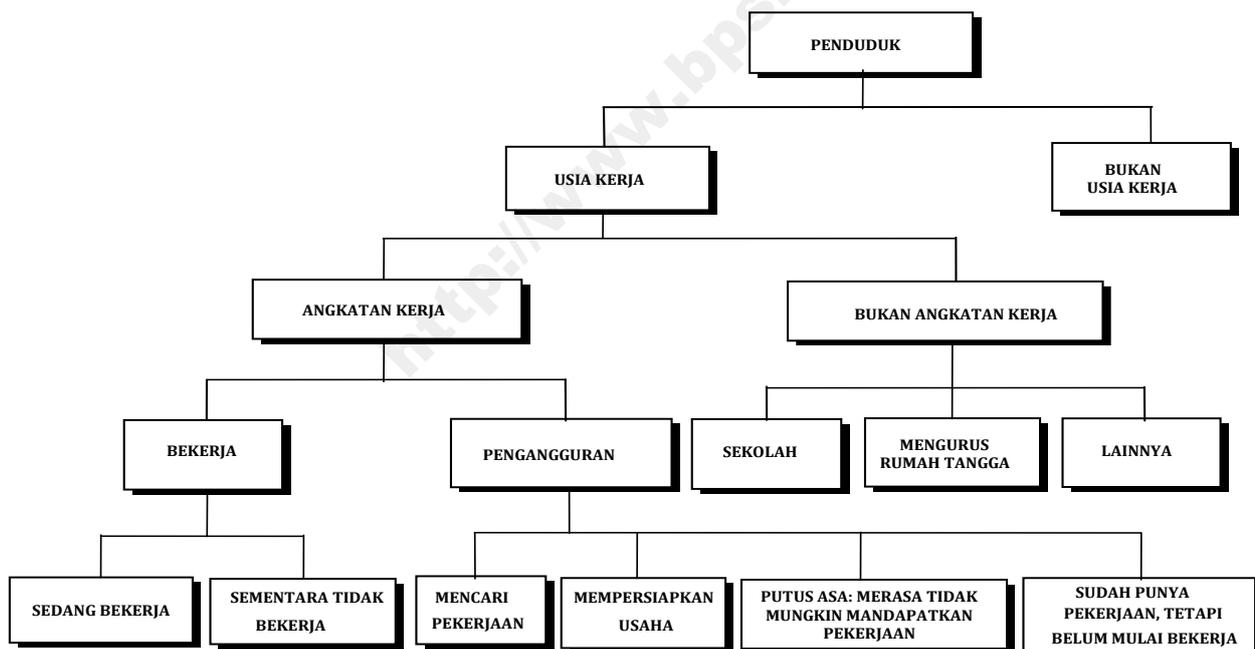
Pada subbab ini, akan disampaikan penjelasan teknis terkait dengan konsep dan definisi yang digunakan dalam Sakernas maupun konsep dan definisi yang digunakan dalam KILM.

2.1. PENJELASAN UMUM

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”*, ILO 1992. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang

dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10

tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun), sedangkan negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumor,

dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, baik telah/sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut

digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung

dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

2.2. INDIKATOR KUNCI PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization*-ILO) meluncurkan KILM pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;

2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran),

- KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
 5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
 6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
 7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
 8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

2.2.1. PARTISIPASI DI DUNIA KERJA

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan

tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun keatas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

2.2.2. INDIKATOR PENDUDUK YANG BEKERJA

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal, setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk

alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;
- 3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan

nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan

pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam keatas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja di setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

Konferensi Internasional Stasisi Tenaga Kerja ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak

tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau ijin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Pembedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

2.2.3. INDIKATOR PENGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN (UNDEREMPLOYMENT), DAN KETIDAKAKTIFAN

KILM 8. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;

- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

memiliki pekerjaan tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi yang diperoleh dari membagi jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada

kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika

diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;

- b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.

- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga

perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada

wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

2.2.4. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;
- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

2.2.5. INDIKATOR UPAH DAN BIAYA TENAGA KERJA

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh

karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

2.2.6. PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour*/Tenaga Kerja) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian

sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

2.2.7. INDIKATOR ELASTISITAS TENAGA KERJA

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan

ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

2.2.8. INDIKATOR KEMISKINAN, PENDUDUK BEKERJA YANG MISKIN, DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga

memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

3.PARTISIPASI DALAM DUNIA KERJA (KILM 1)

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 mencapai 125,32 juta orang, secara absolut naik sebanyak 580 ribu orang apabila dibandingkan dengan keadaan November 2013 (124,74 juta orang) dan naik sebanyak 5,15 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2013 (120,17 juta orang), lihat Lampiran 3. Persentase TPAK mengalami kenaikan tipis dari 69,08 persen pada November 2013 menjadi 69,17 persen pada Februari 2014, yang berarti bahwa persentase tenaga kerja yang aktif secara ekonomi pada Februari 2014 naik sebesar 0,09 persen poin. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, TPAK Februari 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 2,40 persen poin.

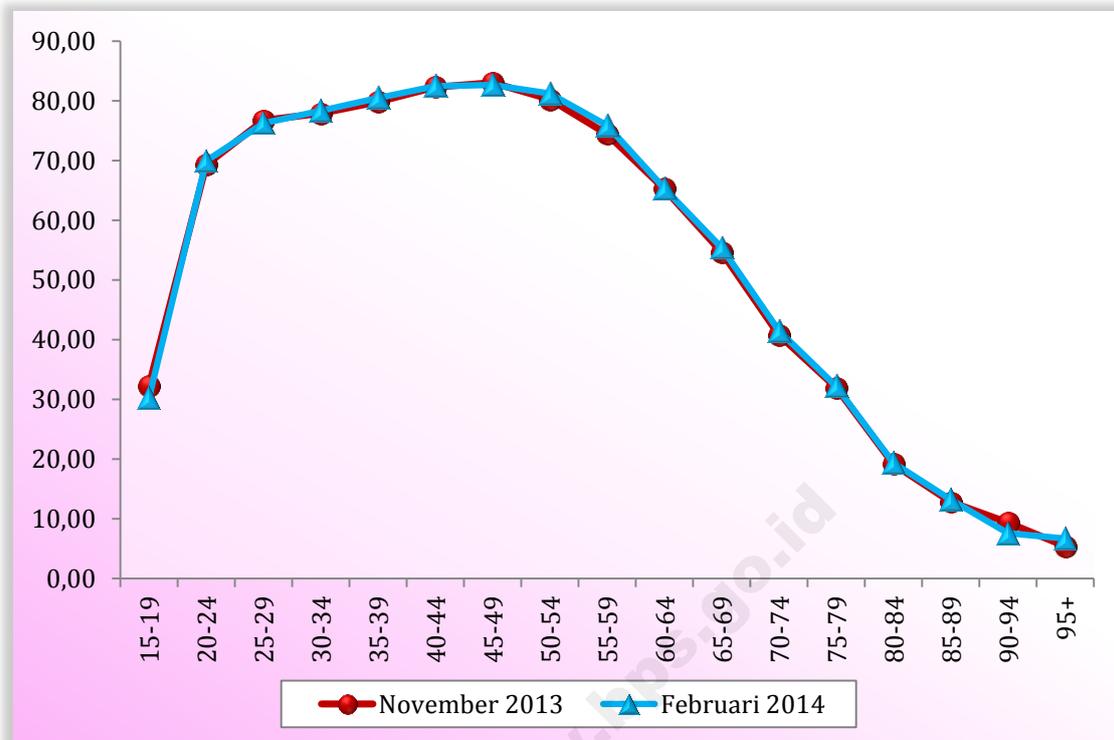
Pada umumnya TPAK laki-laki di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Sebagai gambaran pada Februari 2014, TPAK laki-laki mencapai 85,04 persen sementara pada perempuan hanya 53,37 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 85 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja hanya sebanyak 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Pada periode November 2013–Februari 2014, TPAK

laki-laki turun 0,26 persen poin sedangkan TPAK perempuan naik 0,43 persen poin. Pola yang berbeda terjadi pada periode Agustus 2013–Februari 2014, dimana TPAK untuk laki-laki naik sebesar 1,67 persen poin dan TPAK perempuan juga naik sebesar 3,11 persen poin. Pada periode November 2013–Februari 2014, persentase TPAK mengalami peningkatan hampir pada semua kelompok umur (Tabel 1). Untuk kelompok umur yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah kelompok umur 55–64 tahun, yang naik sebesar 0,84 persen poin. Sedangkan untuk kelompok umur yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah pada kelompok umur 15–24 tahun, yaitu turun sebesar 0,72 persen poin. Pola yang berbeda terjadi pada periode Agustus 2013–Februari 2014, dimana kenaikan persentase terjadi pada semua kelompok umur, kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 55–64 tahun, yaitu naik sebesar 3,84 persen poin. Grafik 1 menunjukkan pola TPAK menurut kelompok umur 5 tahunan, TPAK terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur meskipun pada umumnya keadaan TPAK pada Februari 2014 lebih tinggi dibanding keadaan November 2013. Jarak atau pergeseran grafik yang paling mencolok berada pada kelompok umur 15–19 tahun.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur, 2013–2014 (persen)

Kelompok Umur (1)	2013		2014
	Agustus (2)	November (3)	Februari (4)
Total	66,77	69,08	69,17
Laki-laki	83,37	85,30	85,04
Perempuan	50,26	52,94	53,37
Perkotaan	64,20	67,36	67,18
Perdesaan	69,42	70,85	71,23
(15–24)	48,30	50,51	49,79
Laki-laki	57,71	61,01	60,47
Perempuan	38,64	39,73	38,83
Perkotaan	46,78	49,91	48,93
Perdesaan	49,94	51,15	50,72
(15–64)	69,05	71,24	71,28
Laki-laki	85,43	87,24	86,92
Perempuan	52,48	55,07	55,45
Perkotaan	66,56	69,66	69,42
Perdesaan	71,64	72,90	73,22
(25–54)	77,71	79,78	79,99
Laki-laki	96,98	98,14	97,86
Perempuan	58,40	61,37	62,06
Perkotaan	75,65	78,66	78,65
Perdesaan	79,89	80,96	81,40
(25–34)	75,21	77,30	77,29
Laki-laki	96,20	97,59	97,32
Perempuan	54,30	57,10	57,36
Perkotaan	74,79	77,55	77,25
Perdesaan	75,66	77,02	77,35
(35–54)	79,29	81,33	81,67
Laki-laki	97,46	98,48	98,21
Perempuan	60,99	64,07	65,03
Perkotaan	76,22	79,38	79,56
Perdesaan	82,43	83,33	83,84
(55–64)	67,51	70,51	71,35
Laki-laki	84,43	86,51	86,48
Perempuan	50,14	54,11	55,82
Perkotaan	60,00	63,88	64,09
Perdesaan	74,51	76,89	78,32
65 Tahun keatas	37,32	40,35	41,02
Laki-laki	53,36	56,22	56,71
Perempuan	24,32	27,51	28,37
Perkotaan	29,94	32,01	32,65
Perdesaan	43,52	47,00	47,75

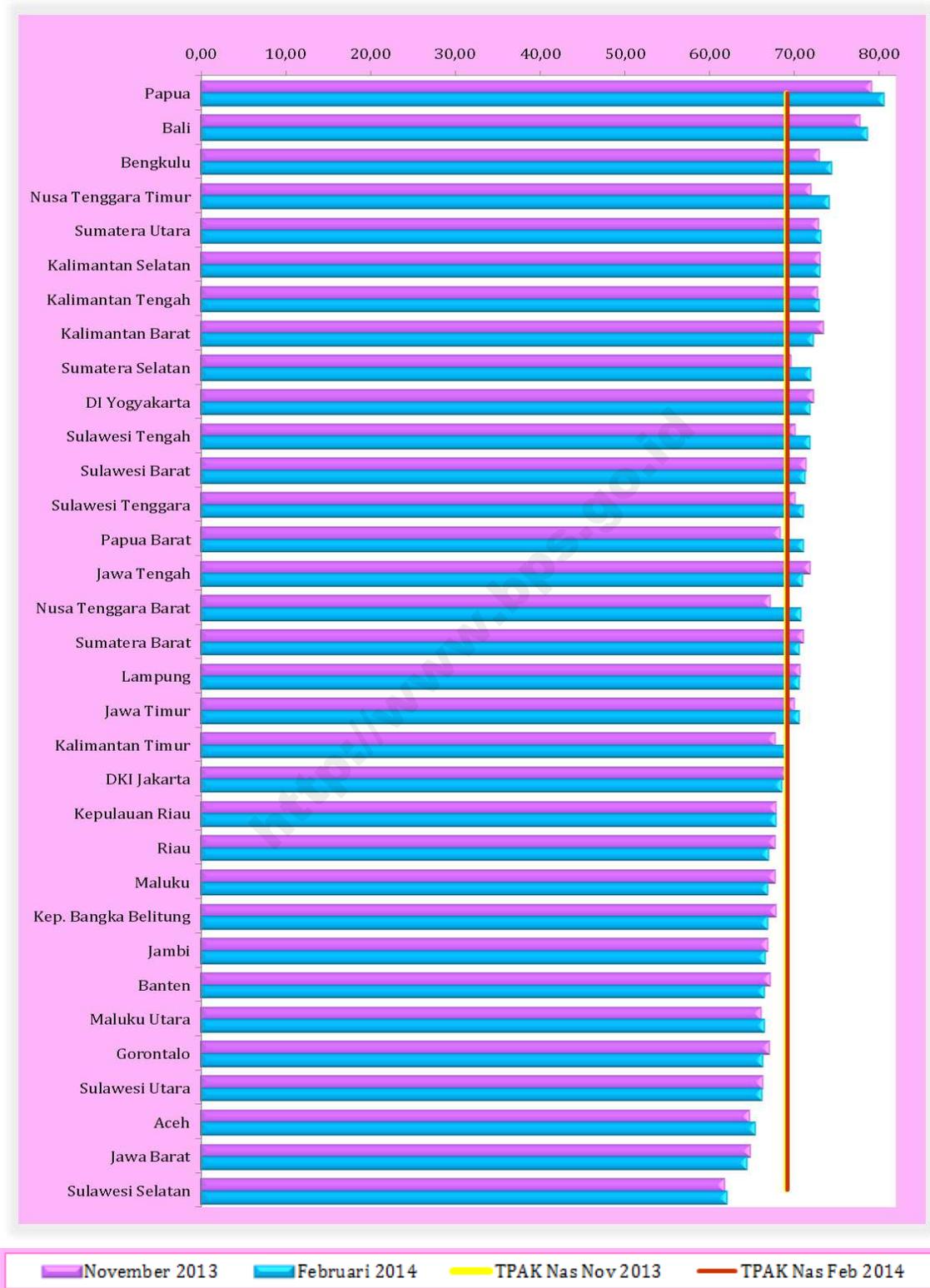
Grafik 1. TPAK Menurut Kelompok Umur, November 2013 dan Februari 2014
(persen)



TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Februari 2014 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (80,54 persen), Provinsi Bali (78,61 persen) dan Provinsi Bengkulu (74,38 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan Sakernas November 2013 posisi pertama dan kedua masih diduduki oleh Provinsi Papua (79,10 persen) dan Provinsi Bali (77,72 persen), hanya posisi ketiga yang berbeda, yang diduduki oleh Provinsi Kalimantan Barat (73,40 persen). Untuk

provinsi dengan TPAK terendah pada Februari 2014 ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (62,02 persen), Provinsi Jawa Barat (64,36 persen), dan Provinsi Aceh (65,32 persen). Tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah hampir sama jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, dimana posisi ini berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (61,71 persen), Provinsi Aceh (64,66 persen) dan Provinsi Jawa Barat (64,79 persen). (Grafik 2).

Grafik 2. TPAK Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)



4. INDIKATOR TENAGA KERJA (KILM 2-7)

4.1. KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR)

Secara nasional, angka EPR pada Februari 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan keadaan November 2013, yaitu meningkat tipis sebesar 0,07 poin dari angka 65,16 menjadi 65,23 pada Februari 2014 ini. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun keatas, terdapat sekitar 65 orang yang bekerja pada Februari 2014. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, EPR Februari 2014 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar 2,57 poin dari angka 62,66.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, EPR laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan EPR perempuan baik pada periode Agustus 2013, November 2013 maupun Februari 2014. EPR laki-laki pada periode Februari 2014 sebesar 80,26 mengalami penurunan sebesar 0,48 poin jika dibandingkan dengan keadaan November 2013. EPR perempuan pada Februari 2014 sebesar 50,26 mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin dibandingkan keadaan November 2013.

Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, EPR daerah perkotaan periode

November 2013-Februari 2014 mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,15 poin sedangkan untuk wilayah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,29 poin.

Apabila dilihat berdasarkan kelompok umur, EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada periode November 2013–Februari 2014 meningkat sebesar 0,51 poin dari 40,79 menjadi 41,30. Begitu pula pada periode Agustus 2013–Februari 2014 EPR penduduk kelompok umur muda juga mengalami peningkatan sebesar 3,42 poin dari 37,88.

Pada periode November 2013–Februari 2014 penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun keatas), mengalami penurunan EPR sebesar 0,08 poin, yaitu dari angka 72,88 pada November 2013 turun menjadi 72,80 pada Februari 2014. Periode Agustus 2013–Februari 2014 EPR pada kelompok umur dewasa meningkat sebesar 2,30 poin dari angka 70,50 (Tabel 3).

Tabel 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013–2014
(dalam juta)

Kelompok Umur	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun keatas	179,97	180,57	181,17
Laki-laki	89,78	90,08	90,38
Perempuan	90,19	90,49	90,79
Perkotaan	91,30	91,62	91,96
Perdesaan	88,67	88,95	89,21
Umur Muda (15–24)	43,28	43,43	43,58
Laki-laki	21,92	22,00	22,08
Perempuan	21,35	21,43	21,50
Perkotaan	22,40	22,48	22,57
Perdesaan	20,88	20,95	21,01
Umur Dewasa (25+)	136,69	137,14	137,59
Laki-laki	67,85	68,08	68,30
Perempuan	68,84	69,07	69,29
Perkotaan	68,90	69,14	69,39
Perdesaan	67,79	68,01	68,20
Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja	112,76	117,67	118,17
Laki-laki	70,34	72,73	72,54
Perempuan	42,43	44,93	45,63
Perkotaan	54,33	57,40	57,47
Perdesaan	58,43	60,27	60,70
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	16,39	17,72	18,00
Laki-laki	9,97	10,97	11,03
Perempuan	6,43	6,74	6,97
Perkotaan	8,03	8,78	8,92
Perdesaan	8,37	8,93	9,07
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	96,37	99,95	100,17
Laki-laki	60,37	61,76	61,51
Perempuan	36,00	38,19	38,66
Perkotaan	46,31	48,62	48,55
Perdesaan	50,06	51,33	51,62

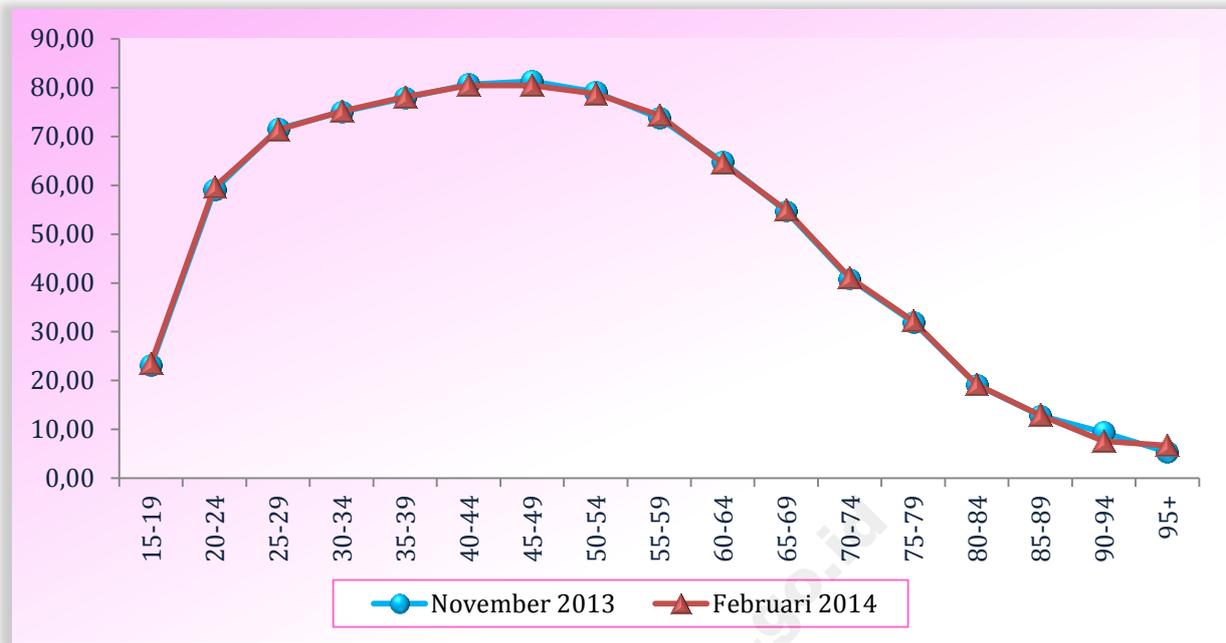
Tabel 3. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Kelompok Umur, 2013–2014

Kelompok Umur	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	62,66	65,16	65,23
Laki-laki	78,35	80,74	80,26
Perempuan	47,04	49,65	50,26
Perkotaan	59,51	62,65	62,50
Perdesaan	65,90	67,75	68,04
Umur Muda (15–24)	37,88	40,79	41,30
Laki-laki	45,46	49,87	49,94
Perempuan	30,09	31,47	32,43
Perkotaan	35,83	39,06	39,55
Perdesaan	40,07	42,65	43,18
Umur Dewasa (25+)	70,50	72,88	72,80
Laki-laki	88,97	90,72	90,06
Perempuan	52,30	55,29	55,79
Perkotaan	67,21	70,32	69,96
Perdesaan	73,85	75,48	75,69

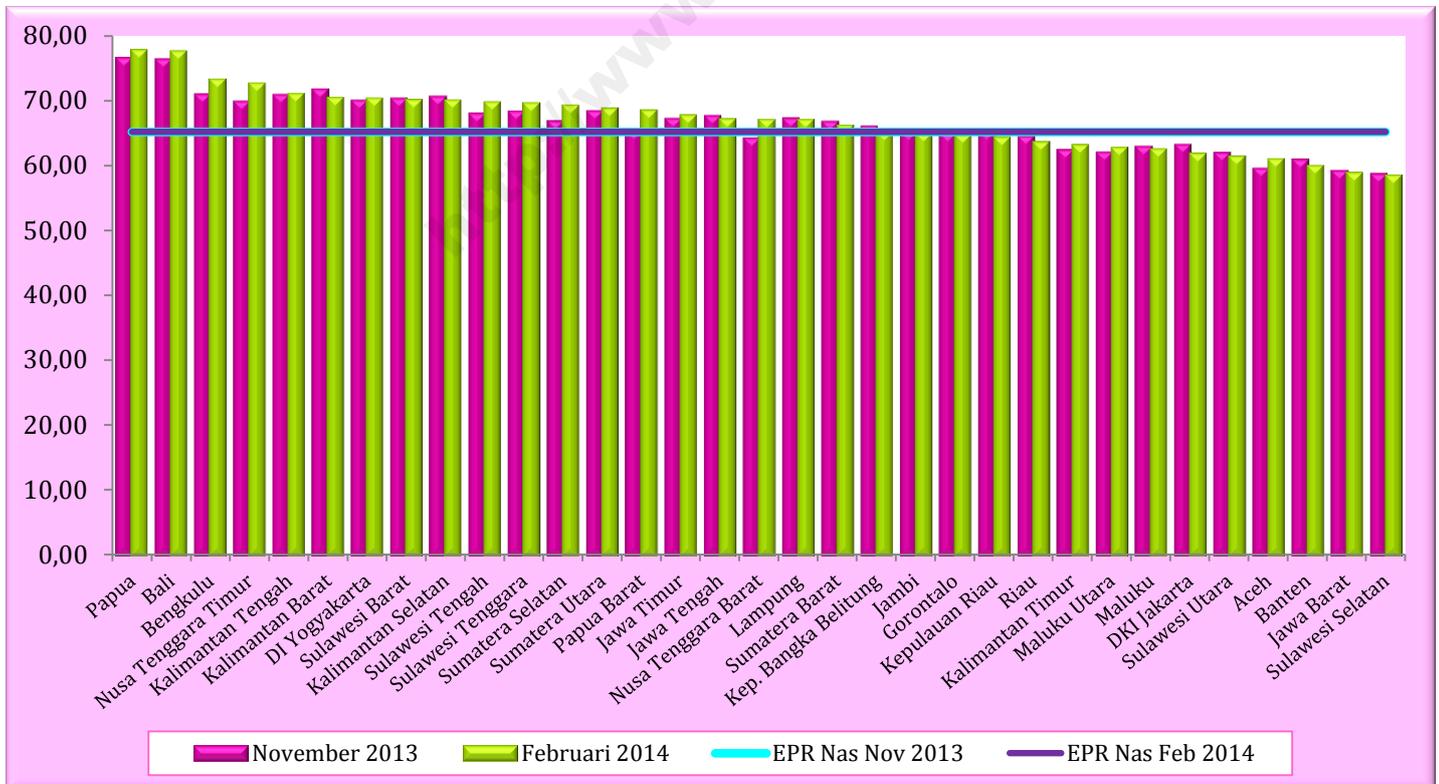
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 3 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 1. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari grafik EPR terlihat bahwa puncak EPR untuk Sakernas Februari 2014 ini berada pada kelompok umur 40–44 tahun. Grafik EPR periode November 2013 dan Februari 2014 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, hanya pada kelompok umur 90–94 tahun dan

kelompok umur 95 tahun ke atas grafik terlihat bergeser. Grafik 4 menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Februari 2014, yaitu Provinsi Papua (77,73), Bali (77,53) dan Bengkulu (73,17). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode yang sama adalah Provinsi Sulawesi Selatan (58,43), Provinsi Jawa Barat (58,79) dan Provinsi Banten (59,91). Ketiga provinsi dengan EPR terendah ini berada jauh dari nilai EPR rata-rata nasional yaitu 65,23.

Grafik 3. EPR Menurut Kelompok Umur, November 2013 dan Februari 2014



Grafik 4. EPR Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014



4.2. KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan utama pada Februari 2014 ini polanya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan periode sebelumnya (Agustus dan November 2013), dimana persentase terbesar diduduki penduduk bekerja dengan status berusaha, diikuti dengan penduduk bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai, dan urutan terakhir diduduki penduduk bekerja dengan status pengusaha.

Pada periode November 2013–Februari 2014, penduduk yang bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 0,52 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,17 persen poin, dan untuk penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami peningkatan sebesar 0,35 persen poin.

Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2013–Februari 2014, penduduk bekerja dengan status berusaha juga mengalami penurunan sebesar 0,47 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai meningkat sebesar 0,21 persen, dan untuk status pekerja keluarga meningkat sebesar 0,26 persen.

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment*, pada keadaan Februari 2014 mencapai 59,81 persen, hal ini dapat dikatakan

bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 60 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, persentase pekerja rentan mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin, begitu pula bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013, persentase pekerja rentan juga menurun sebesar 0,29 persen poin.

Keadaan pekerja rentan menurut jenis kelamin pada Agustus 2013, November 2013 maupun Februari 2014 menunjukkan bahwa pekerja rentan perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pekerja rentan laki-laki, sebagai fakta pada Februari 2014 ini persentase pekerja rentan perempuan sekitar 65 persen dan pekerja rentan laki-laki sekitar 56 persen.

Grafik 5 menunjukkan provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Februari 2014, yaitu Provinsi Papua (82,03 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (81,35 persen), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (75,31 persen). Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013 persentase pekerja rentan pada ketiga provinsi tersebut tidak mengalami perubahan.

Tabel 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam juta)

Status Pekerjaan Utama	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	112,76	117,67	118,17
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	41,12	42,96	43,35
Berusaha	53,67	56,07	55,69
Pengusaha	3,86	4,11	4,14
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	38,55	39,86	40,06
Pekerja bebas	11,26	12,10	11,49
Pekerja keluarga	17,97	18,64	19,13
Pekerja rentan*)	67,77	70,60	70,68
Laki-laki	70,34	72,73	72,54
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	27,11	28,04	28,19
Berusaha	38,38	39,90	39,42
Pengusaha	3,12	3,36	3,38
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	26,85	27,15	27,25
Pekerja bebas	8,41	9,39	8,79
Pekerja keluarga	4,84	4,79	4,93
Pekerja rentan*)	40,11	41,34	40,97
Perempuan	42,43	44,93	45,63
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	14,02	14,92	15,16
Berusaha	15,29	16,17	16,27
Pengusaha	0,74	0,75	0,77
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar	11,70	12,71	12,80
Pekerja bebas	2,85	2,71	2,70
Pekerja keluarga	13,12	13,84	14,20
Pekerja rentan*)	27,67	29,26	29,71

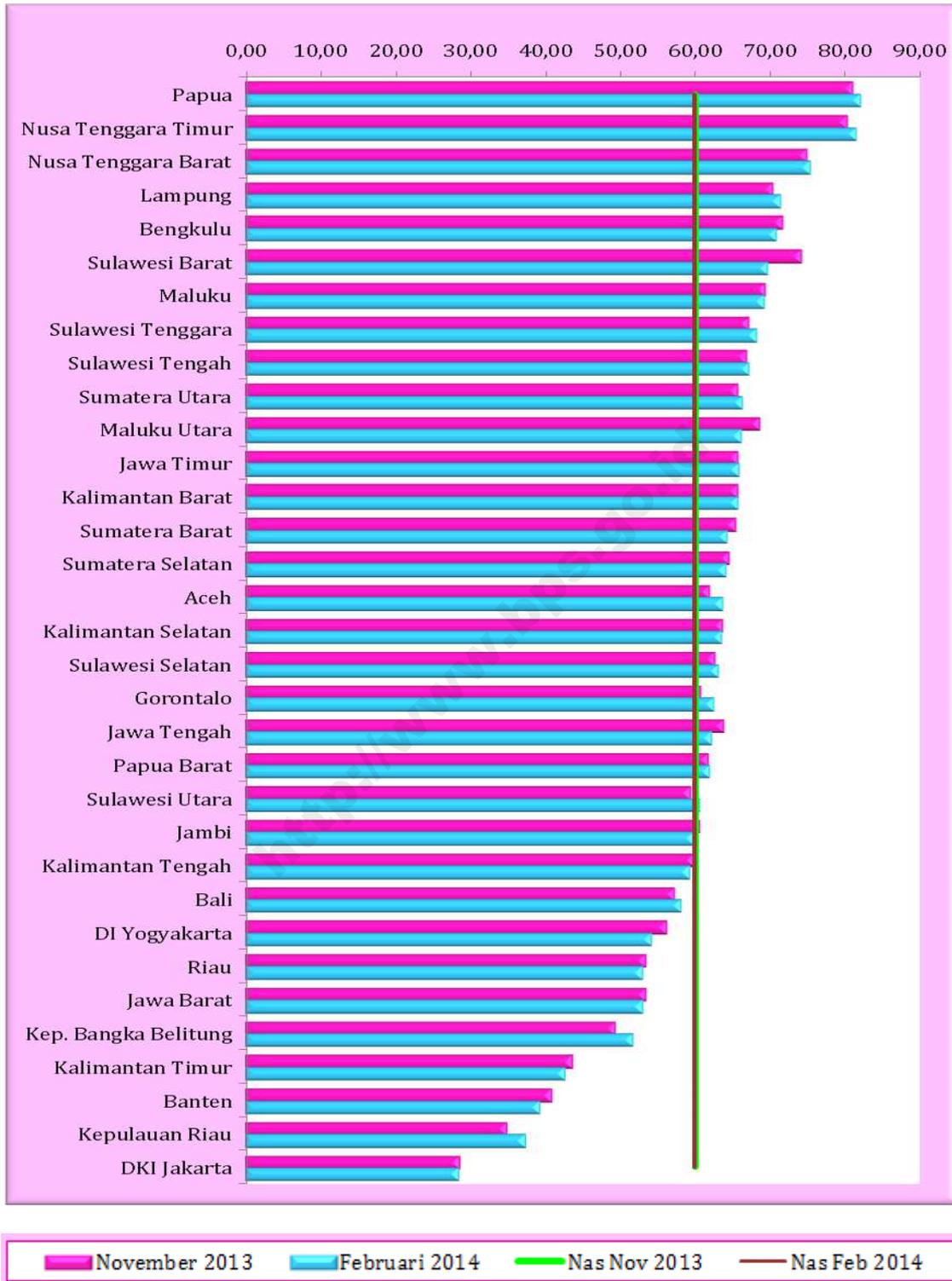
Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Tabel 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014

Status Pekerjaan Utama	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,47	36,51	36,68
Berusaha	47,60	47,65	47,13
Pengusaha	3,43	3,49	3,51
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	34,19	33,88	33,90
Pekerja bebas	9,98	10,28	9,72
Pekerja keluarga	15,93	15,84	16,19
Pekerja rentan*)	60,10	60,00	59,81
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	38,54	38,55	38,87
Berusaha	54,57	54,86	54,34
Pengusaha	4,44	4,62	4,65
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	38,18	37,33	37,57
Pekerja bebas	11,95	12,91	12,12
Pekerja keluarga	6,89	6,59	6,79
Pekerja rentan*)	57,02	56,83	56,48
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	33,03	33,20	33,21
Berusaha	36,04	35,99	35,66
Pengusaha	1,76	1,67	1,69
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	27,57	28,29	28,05
Pekerja bebas	6,71	6,03	5,92
Pekerja keluarga	30,93	30,81	31,13
Pekerja rentan*)	65,22	65,13	65,10

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Grafik 5. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Rentan Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014



4.3. KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

Hasil Sakernas Februari 2014 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia masih didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk yang bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 44,68 persen, urutan kedua ditempati oleh sektor pertanian sebesar 34,56 persen, dan disusul sektor manufaktur sebesar 20,76 persen.

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan sebesar 21,84 persen dan sektor jasa kemasyarakatan 15,64 persen. Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri dan sektor bangunan dengan persentase masing-masing sebesar 13,02 persen dan 6,10 persen.

Hasil Sakernas Februari 2014 tidak menunjukkan perubahan berarti dibandingkan dengan keadaan November 2013, sektor jasa-jasa naik sebesar 0,67 persen poin, sektor pertanian dan sektor manufaktur mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar 0,07 persen poin dan 0,60 persen poin.

Pada periode Agustus 2013–Februari 2014, sektor jasa-jasa justru mengalami penurunan yaitu sebesar 0,15 persen poin sektor pertanian juga turun sebesar 0,22 persen poin, sedangkan sektor manufaktur mengalami kenaikan sebesar 0,37 persen poin.

Komposisi sektoral Sakernas Februari 2014 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (73,43 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Kepulauan Riau (31,38 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (78,35 persen).

Pada periode November 2013–Februari 2014 persentase tertinggi sektor pertanian berada di Provinsi Papua mencapai 73,37 persen. Sedangkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor manufaktur mencapai 37,16 persen. Sementara Provinsi DKI Jakarta dengan persentase penduduk tertinggi penduduk yang bekerja di sektor jasa-jasa mencapai 80,84 persen.

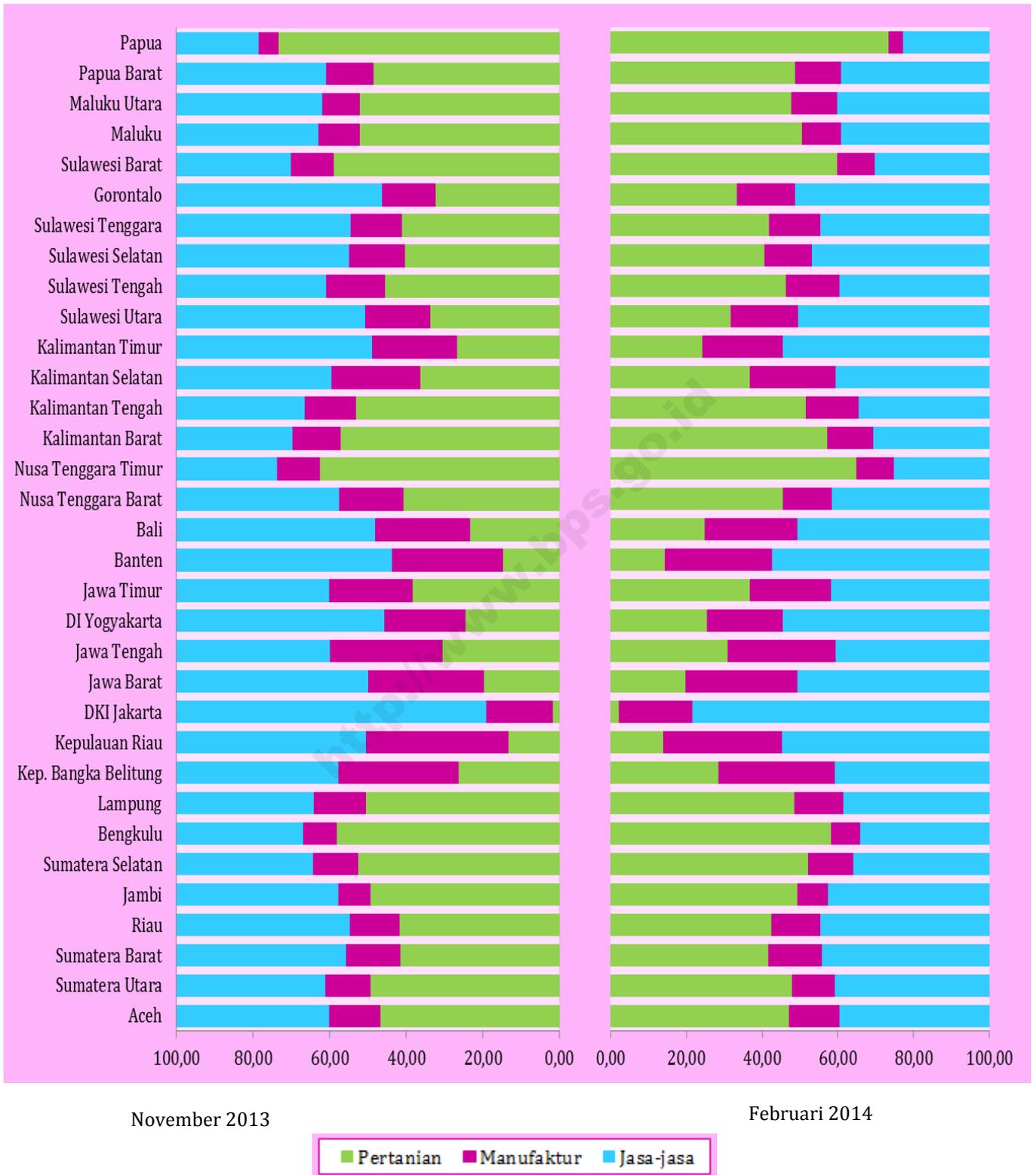
Tabel 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam juta)

Lapangan Pekerjaan Utama	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	112,76	117,67	118,17
Pertanian	39,22	40,75	40,83
Manufaktur	22,99	25,14	24,54
Pertambangan	1,43	1,65	1,63
Industri	14,96	15,52	15,39
Listrik, gas dan air	0,25	0,28	0,31
Bangunan	6,35	7,69	7,21
Jasa-jasa	50,55	51,78	52,80
Perdagangan	24,10	25,32	25,81
Transportasi	5,10	5,03	5,32
Keuangan	2,90	3,15	3,19
Jasa kemasyarakatan	18,45	18,28	18,48
Laki-laki	70,34	72,73	72,54
Pertanian	25,04	25,48	25,38
Manufaktur	16,62	18,42	17,94
Pertambangan	1,32	1,47	1,45
Industri	8,91	9,18	9,17
Listrik, gas dan air	0,22	0,25	0,28
Bangunan	6,17	7,52	7,04
Jasa-jasa	28,68	28,83	29,22
Perdagangan	11,85	11,98	12,10
Transportasi	4,76	4,73	4,95
Keuangan	2,12	2,23	2,27
Jasa kemasyarakatan	9,95	9,89	9,90
Perempuan	42,43	44,93	45,63
Pertanian	14,18	15,27	15,46
Manufaktur	6,38	6,71	6,59
Pertambangan	0,11	0,17	0,17
Industri	6,05	6,33	6,23
Listrik, gas dan air	0,03	0,03	0,03
Bangunan	0,18	0,18	0,17
Jasa-jasa	21,87	22,95	23,58
Perdagangan	12,25	13,34	13,71
Transportasi	0,34	0,30	0,37
Keuangan	0,78	0,92	0,92
Jasa kemasyarakatan	8,50	8,39	8,58

Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2013–2014

Lapangan Pekerjaan Utama	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,78	34,63	34,56
Manufaktur	20,39	21,36	20,76
Pertambangan	1,27	1,40	1,38
Industri	13,27	13,18	13,02
Listrik, gas dan air	0,22	0,24	0,26
Bangunan	5,63	6,54	6,10
Jasa-jasa	44,83	44,01	44,68
Perdagangan	21,38	21,52	21,84
Transportasi	4,52	4,28	4,50
Keuangan	2,57	2,67	2,70
Jasa kemasyarakatan	16,36	15,54	15,64
Laki-laki	100,00	100,00	100,00
Pertanian	35,60	35,03	34,99
Manufaktur	23,62	25,33	24,73
Pertambangan	1,88	2,03	2,00
Industri	12,67	12,63	12,63
Listrik, gas dan air	0,31	0,34	0,39
Bangunan	8,76	10,33	9,71
Jasa-jasa	40,78	39,64	40,28
Perdagangan	16,85	16,48	16,68
Transportasi	6,77	6,50	6,83
Keuangan	3,01	3,06	3,13
Jasa kemasyarakatan	14,15	13,60	13,64
Perempuan	100,00	100,00	100,00
Pertanian	33,42	33,98	33,87
Manufaktur	15,03	14,94	14,45
Pertambangan	0,25	0,38	0,38
Industri	14,26	14,09	13,64
Listrik, gas dan air	0,08	0,08	0,06
Bangunan	0,44	0,39	0,37
Jasa-jasa	51,55	51,08	51,68
Perdagangan	28,89	29,69	30,04
Transportasi	0,79	0,67	0,81
Keuangan	1,84	2,04	2,02
Jasa kemasyarakatan	20,03	18,68	18,81

Grafik 6. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, November 2013 dan Februari 2014



4.4. KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

Pada Februari 2014, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 22,34 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 22 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin dibandingkan dengan keadaan November 2013 (22,98 persen), serta mengalami penurunan sebesar 1,37 persen poin jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 (23,71 persen). Hasil Sakernas Februari 2014 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 33,02 persen dan 15,63 persen (Tabel 8).

Apabila dibandingkan dengan keadaan November 2013, tingkat pekerja paruh waktu perempuan mengalami penurunan sebesar 1,05 persen poin (dari 34,07 persen menjadi 33,02 persen). Begitu pula dengan pekerja paruh waktu laki-laki mengalami penurunan 0,50 persen poin (dari 16,13 persen menjadi 15,63 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, selama periode yang sama, tingkat pekerja paruh waktu pada Februari 2014 mengalami penurunan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan, dengan penurunan masing-masing sebesar 0,72 persen poin dan 0,61 persen poin.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 penurunan terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu di daerah perdesaan maupun perkotaan. Penurunan juga terjadi pada tingkat pekerja paruh waktu jenis kelamin laki-laki.

Merujuk kembali pada hasil Sakernas Februari 2014, tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (40,53 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (36,01 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (34,37 persen). Begitu pula pada periode Sakernas November 2013, provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu tertinggi juga diduduki oleh ketiga provinsi tersebut.

Untuk provinsi dengan tingkat paruh waktu terendah pada Februari 2014 terdapat pada Provinsi DKI Jakarta (9,64 persen), Provinsi Banten (12,83 persen) dan Provinsi Kepulauan

Riau (13,14 persen). Ketiga provinsi ini juga menjadi provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada periode Sakernas November 2013 (Grafik 8).

Tabel 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu, 2013–2014 (persen)

Indikator	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	23,71	22,98	22,34
Laki-laki	18,56	16,13	15,63
Perempuan	32,25	34,07	33,02
Perkotaan	15,55	15,36	14,75
Perdesaan	31,30	30,25	29,53
Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu	51,18	56,61	57,06

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan Sakernas Februari 2014 mencapai 57,06 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 57 orang diantaranya adalah perempuan. *Share* perempuan pada pekerja paruh waktu pada Februari 2014 terus mengalami kenaikan jika dibandingkan keadaan November 2013 maupun Agustus 2013, yaitu masing-masing meningkat sebesar 0,45 persen poin dan 5,88 persen poin (Tabel 8).

Grafik 7 menunjukkan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu tertinggi pada Februari 2014

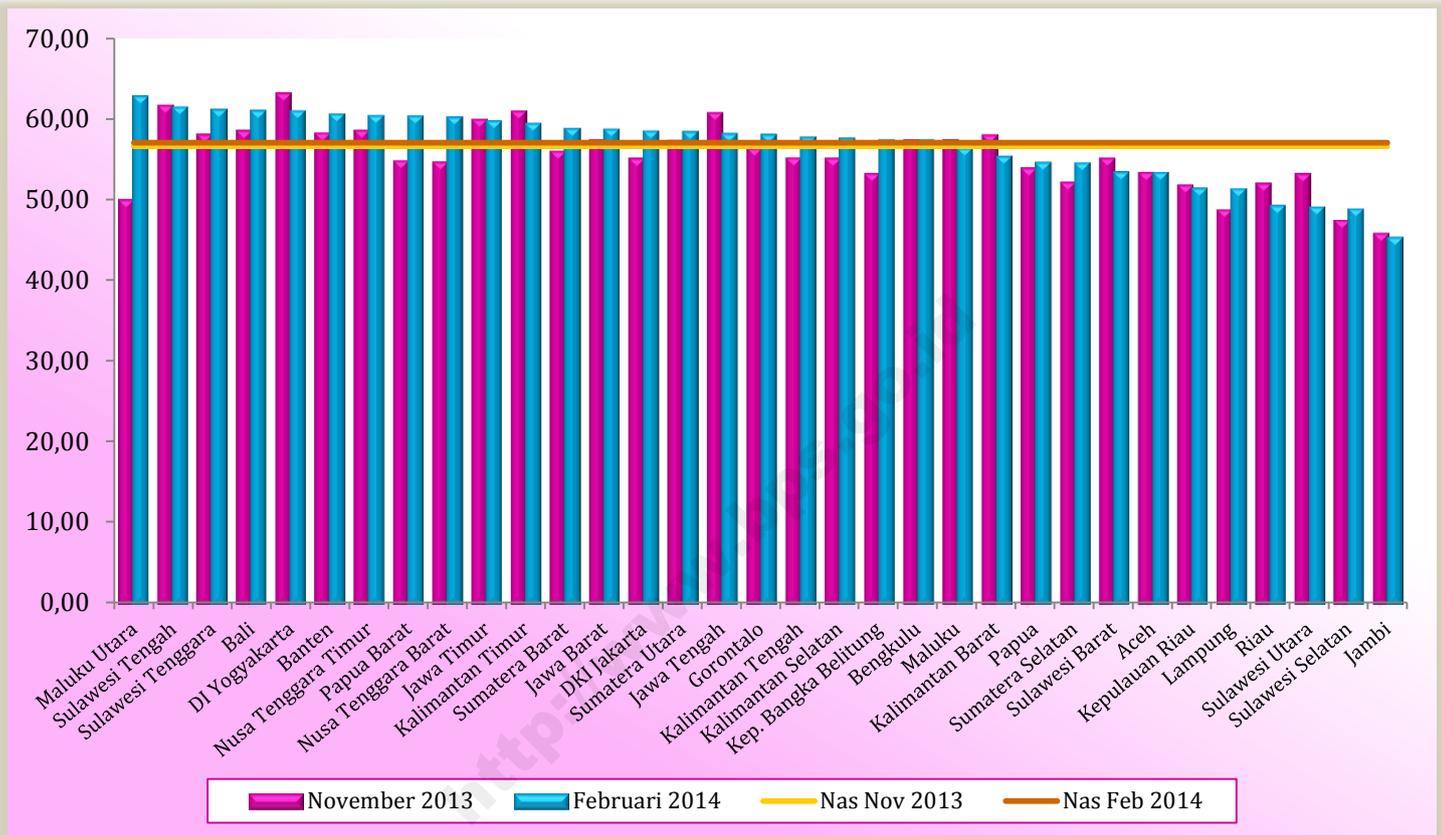
terdapat di Provinsi Maluku Utara (62,71 persen), Provinsi Sulawesi Tengah (61,34 persen) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (61,04 persen). Sedangkan pada periode November 2013 posisi ini diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta (63,14 persen), Provinsi Sulawesi Tengah (61,64 persen) dan Provinsi Kalimantan Timur (60,89 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Jambi sebesar 45,20 persen, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 48,75 persen, dan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 48,96 persen.

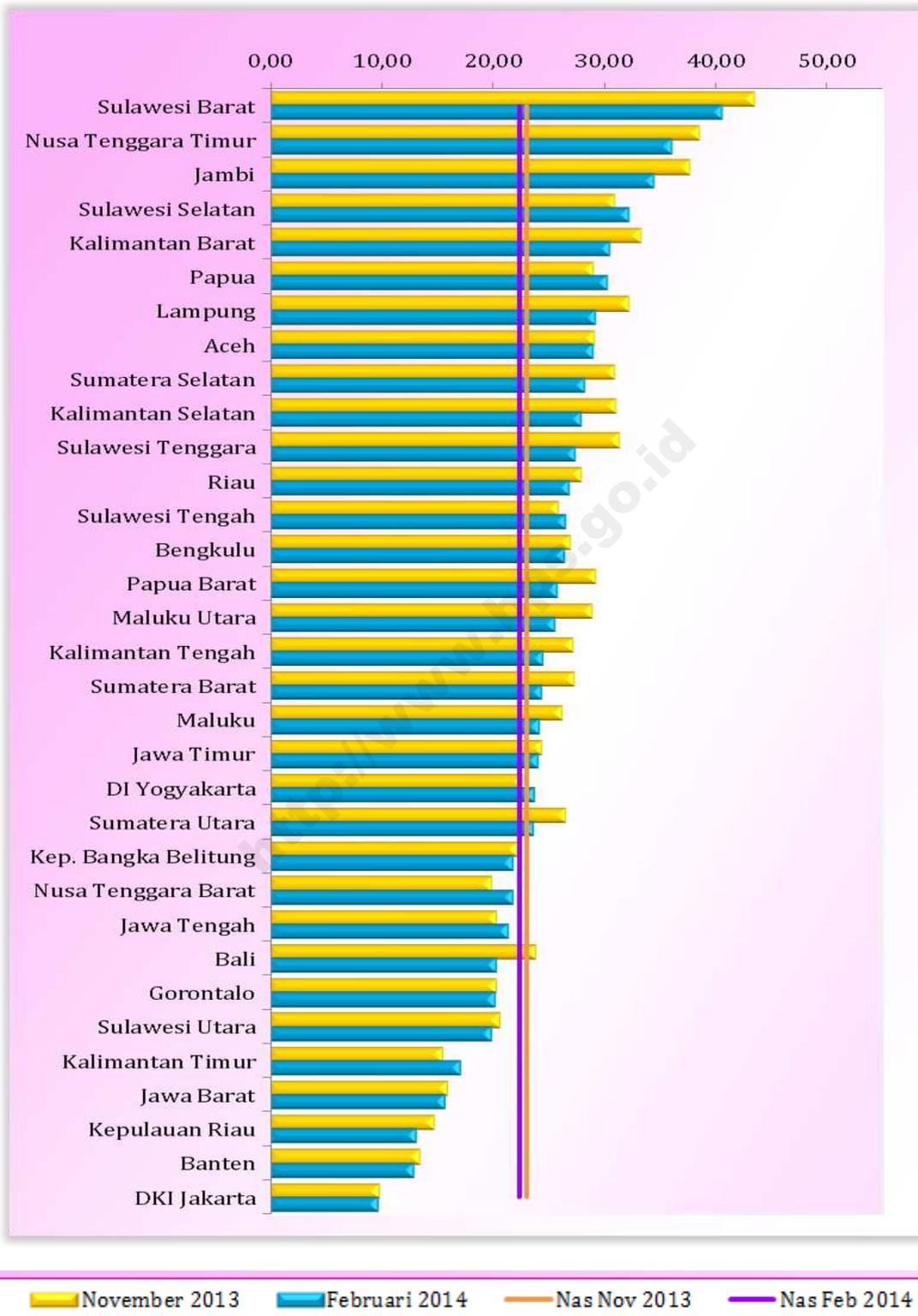
Jika dibandingkan dengan keadaan November 2013, posisi tersebut diduduki oleh Provinsi Jambi sebesar 45,77 persen, Provinsi Sulawesi

Selatan sebesar 47,40 persen, dan Provinsi Lampung sebesar 48,69 persen.

Grafik 7. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)



Grafik 8. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)



4.5. KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu yang mencapai dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu pada Februari 2014 mencapai 33,47 persen atau mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen poin jika dibandingkan dengan November 2013 (33,36 persen), namun mengalami penurunan sebesar 6,30 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 (39,77 persen).

Dapat dicermati pula pada Tabel 9, hasil Sakernas pada periode Agustus 2013, November 2013, dan Februari 2014 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Seperti yang terjadi pada Februari 2014, persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 44,22 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 26,72 persen.

Apabila kita amati, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Hal tersebut terjadi baik pada Agustus 2013, November

2013, dan Februari 2014. Hasil Sakernas Februari 2014 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 43,25 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 23,16 persen.

Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 30,38 persen. Akan tetapi masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 26,06 persen. Apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan maka persentase laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sebagai gambaran pada Februari 2014, persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 21,53 persen, sementara persentase penduduk laki-laki yang bekerja di atas 48 jam per minggu mencapai 28,91 persen.

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013–2014

Jumlah Jam Kerja	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00
0 jam*	6,30	1,89	2,19
1–14 jam	7,85	5,93	6,16
15–24 jam	13,38	12,15	11,67
25–34 jam	12,24	13,39	13,45
35–39 jam	10,28	10,19	10,09
40–48 jam	27,67	31,00	30,38
49–59 jam	12,75	14,58	14,93
60 jam keatas	9,53	10,87	11,13
Laki-Laki	100,00	100,00	100,00
0 jam*	6,45	1,96	2,33
1–14 jam	5,71	3,56	3,85
15–24 jam	11,56	9,19	8,44
25–34 jam	11,74	11,85	12,10
35–39 jam	9,81	9,68	9,55
40–48 jam	30,27	35,52	34,82
49–59 jam	14,63	17,10	17,42
60 jam keatas	9,83	11,14	11,49
Perempuan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	6,05	1,76	1,97
1–14 jam	11,38	9,77	9,83
15–24 jam	16,40	16,94	16,81
25–34 jam	13,08	15,87	15,61
35–39 jam	11,06	11,03	10,94
40–48 jam	23,37	23,69	23,31
49–59 jam	9,64	10,52	10,98
60 jam keatas	9,03	10,42	10,55

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Tabel 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2013–2014 (lanjutan)

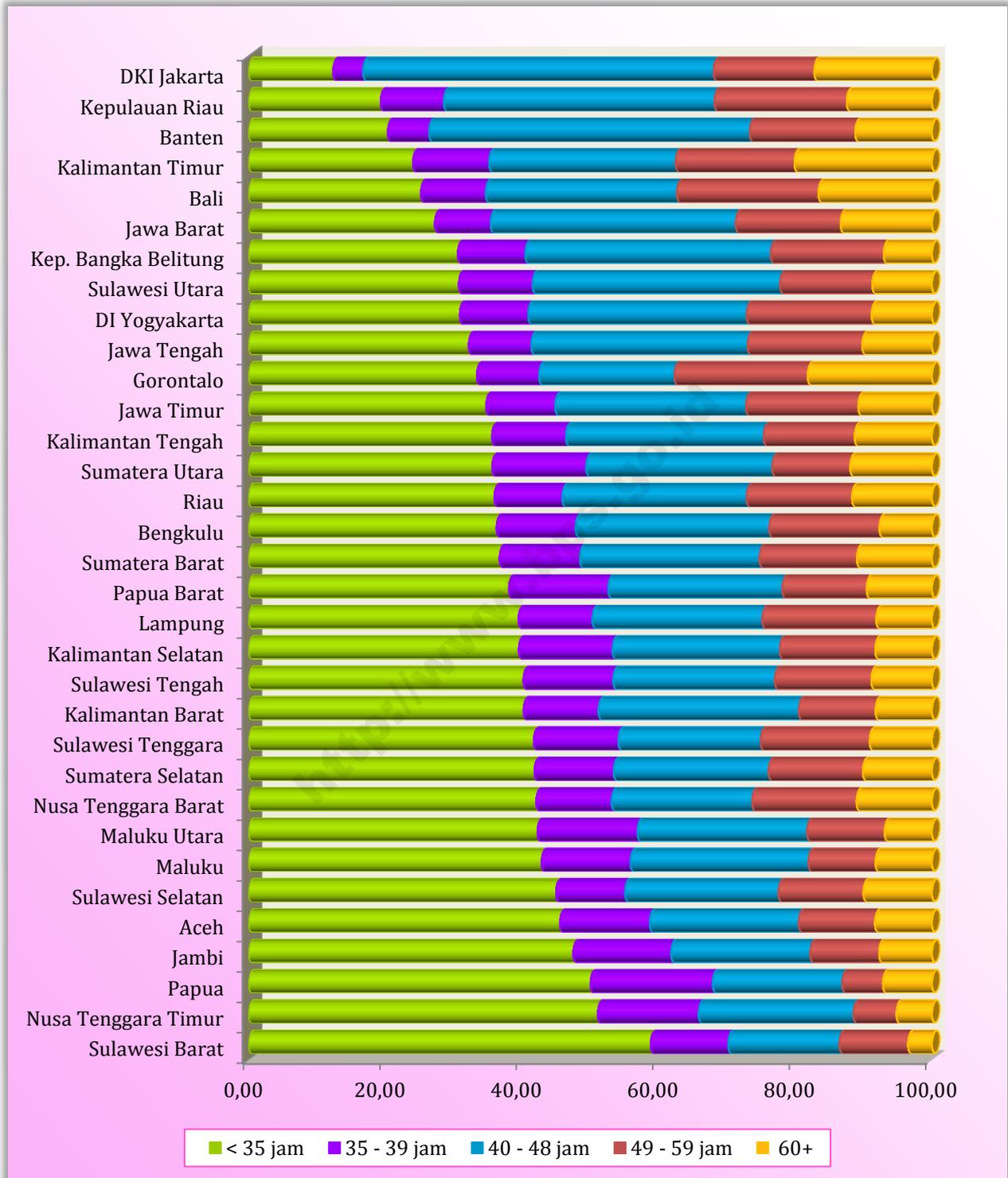
Jumlah Jam Kerja	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	6,45	1,68	2,30
1–14 jam	4,98	4,02	4,19
15–24 jam	8,62	7,60	7,27
25–34 jam	8,36	9,49	9,40
35–39 jam	8,39	8,74	8,47
40–48 jam	35,22	38,77	37,68
49–59 jam	14,61	15,37	16,14
60 jam keatas	13,37	14,33	14,56
Perdesaan	100,00	100,00	100,00
0 jam*	6,15	2,08	2,09
1–14 jam	10,51	7,76	8,02
15–24 jam	17,80	16,48	15,84
25–34 jam	15,85	17,09	17,30
35–39 jam	12,05	11,57	11,62
40–48 jam	20,66	23,61	23,46
49–59 jam	11,02	13,84	13,79
60 jam keatas	5,95	7,57	7,88

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Berdasarkan Sakernas Februari 2014 seperti yang terlihat pada Grafik 9 di bawah ini menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu terbanyak yaitu Provinsi Sulawesi Barat (58,87 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (51,13 persen),

dan Provinsi Jambi (50,06 persen). Sedangkan sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (12,39 persen), Provinsi Kepulauan Riau (19,35 persen), dan Provinsi Banten (20,40 persen).

Grafik 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Februari 2014



4.6. KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Perburuhan (ICLS) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 pada Tabel 10, menunjukkan bahwa dari 118,17 juta orang yang bekerja, sebanyak 53,59 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (63,33 juta orang).

Berdasarkan hasil Sakernas pada periode Agustus 2013, November 2013 dan Februari 2014 tampak adanya fluktuasi persentase penduduk bekerja di sektor informal, di tengah

usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2013 sebesar 53,03 persen, naik menjadi 53,77 persen pada November 2013, namun turun pada Februari 2014 menjadi 53,59 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Agustus 2013 mencapai 46,97 persen, turun menjadi 46,23 persen pada November 2013, dan naik pada Februari 2014 hingga mencapai 46,41 persen (Tabel 11).

Pada Februari 2014, berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yaitu mencapai 64,94 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Agustus 2013 dan November 2013 masing-masing mencapai 65,94 persen dan 65,47 persen.

Sedangkan pada kelompok perempuan, dari total 45,63 juta orang yang bekerja terdapat sebanyak 26,40 juta orang (57,86 persen) yang bekerja pada sektor informal sedangkan sisanya yaitu 19,23 juta orang (42,14 persen) bekerja pada sektor formal.

Tabel 10. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013–2014 (dalam juta)

Kategori Sektor	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	112,76	117,67	118,17
Laki-laki	70,34	72,73	72,54
Perempuan	42,43	44,93	45,63
Perkotaan	54,33	57,40	57,47
Perdesaan	58,43	60,27	60,70
Formal	52,96	54,40	54,84
Laki-laki	34,92	35,62	35,61
Perempuan	18,04	18,78	19,23
Perkotaan	35,76	36,23	36,47
Perdesaan	17,21	18,17	18,37
Informal	59,80	63,27	63,33
Laki-laki	35,41	37,12	36,93
Perempuan	24,39	26,15	26,40
Perkotaan	18,58	21,17	21,00
Perdesaan	41,22	42,10	42,33

Tabel 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Kategori Sektor Formal dan Informal, 2013–2014

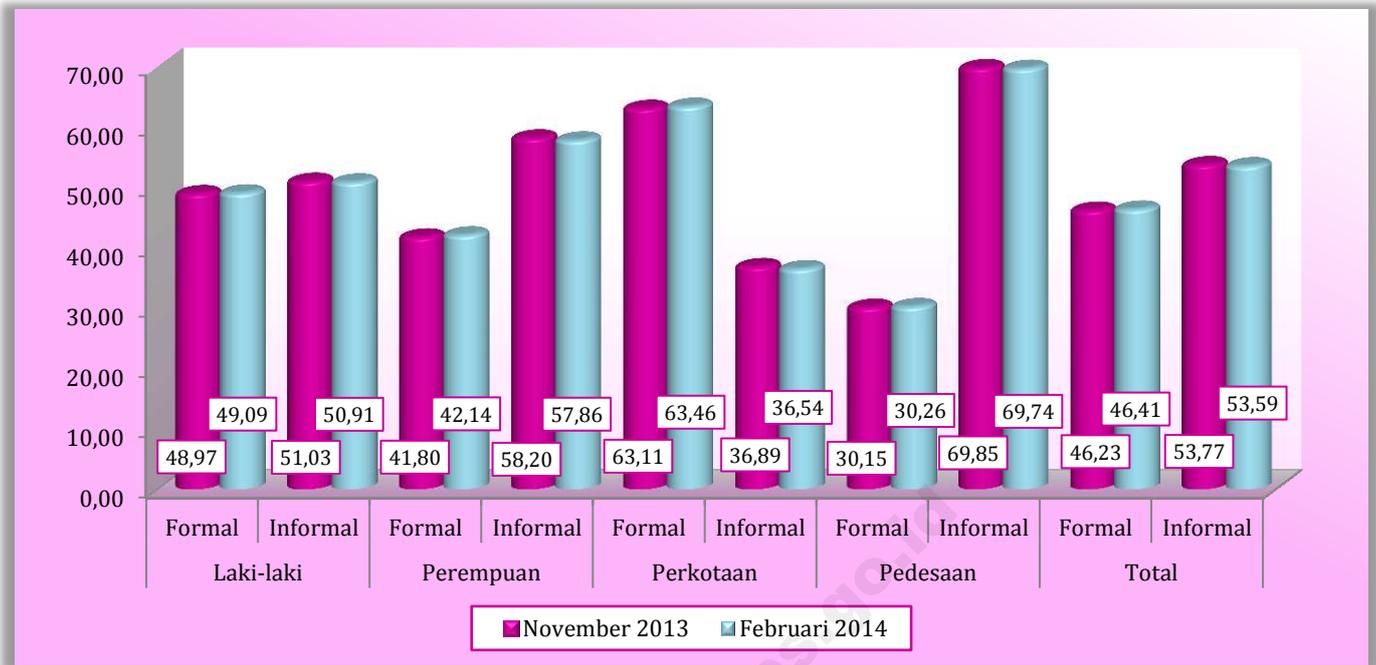
Kategori Sektor	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total Formal+Informal	100,00	100,00	100,00
Formal	46,97	46,23	46,41
Informal	53,03	53,77	53,59
Formal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	65,94	65,47	64,94
Perempuan	34,06	34,53	35,06
Perkotaan	67,51	66,60	66,50
Perdesaan	32,49	33,40	33,50
Informal	100,00	100,00	100,00
Laki-laki	59,22	58,66	58,31
Perempuan	40,78	41,34	41,69
Perkotaan	31,07	33,46	33,16
Perdesaan	68,93	66,54	66,84

Berdasarkan Sakernas Februari 2014 pada Tabel 11 menunjukkan bahwa pada penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 66,50 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan November 2013 yang mencapai 66,60 persen (turun 0,10 persen poin), begitu pula bila dibandingkan Agustus 2013 juga mengalami penurunan sebesar 1,01 persen poin. Sementara itu, di sisi lain persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, dan mengalami peningkatan bila dibanding keadaan November 2013, yaitu dari 66,54 persen pada November 2013 naik menjadi 66,84 persen pada Februari 2014.

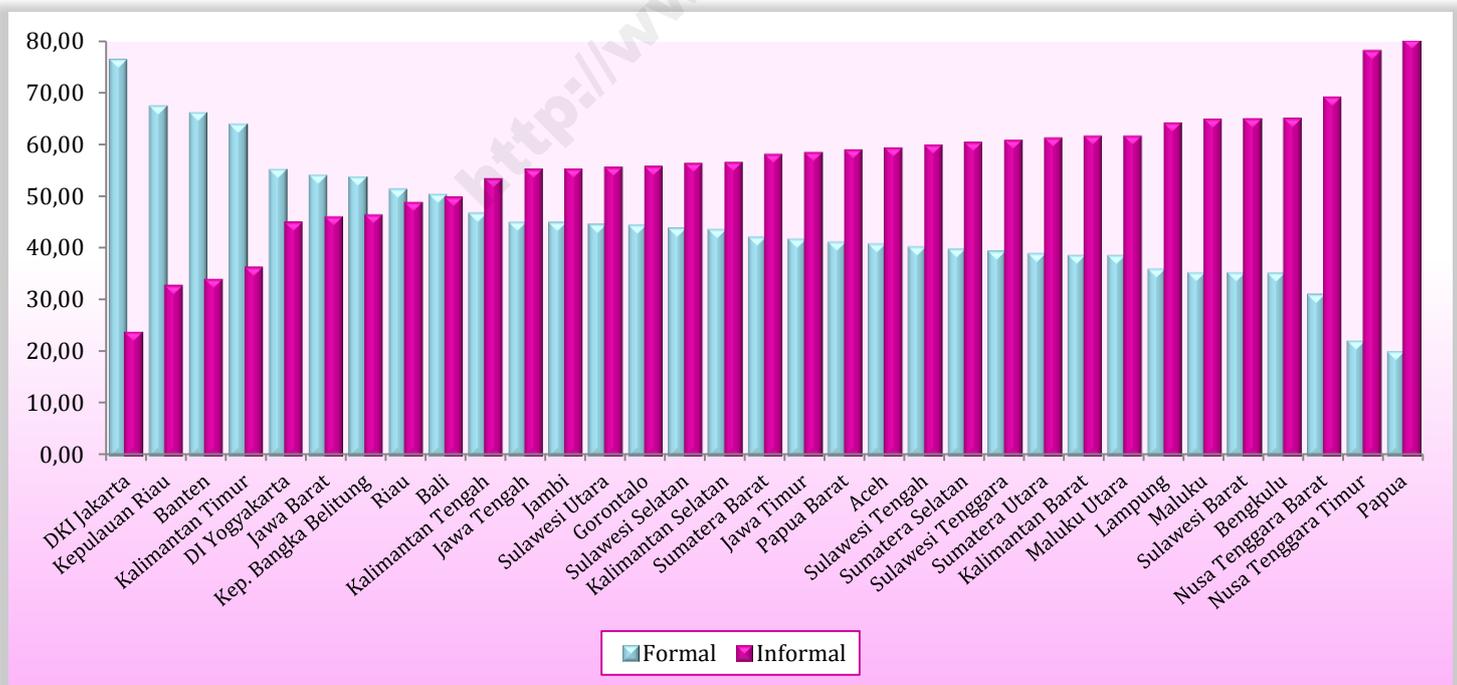
Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak

berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 11). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, empat diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (76,31 persen), Kepulauan Riau (67,33 persen), Banten (66,08 persen) dan DI Yogyakarta (55,09 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (63,84 persen). Sementara itu disisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (80,10 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (78,05 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (69,07 persen), Provinsi Bengkulu (64,95 persen), dan Provinsi Sulawesi Barat (64,86 persen).

Grafik 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Sektor Formal dan Informal, November 2013 dan Februari 2014



Grafik 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Berdasarkan Sektor Formal dan Informal Menurut Provinsi, Februari 2014



5. INDIKATOR PENGANGGURAN

5.1. KILM 8. PENGANGGURAN

TPT pada Februari 2014 sebesar 5,70 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Februari 2014, menunjukkan bahwa TPT di Indonesia mengalami sedikit fluktuasi bila dibandingkan dengan keadaan November

maupun Agustus 2013. Seperti yang terlihat pada Tabel 12, TPT pada Februari 2014 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 persen poin bila dibandingkan November 2013 (5,76 persen), tetapi turun sebesar 0,47 persen poin dibandingkan Agustus 2013 (6,17 persen).

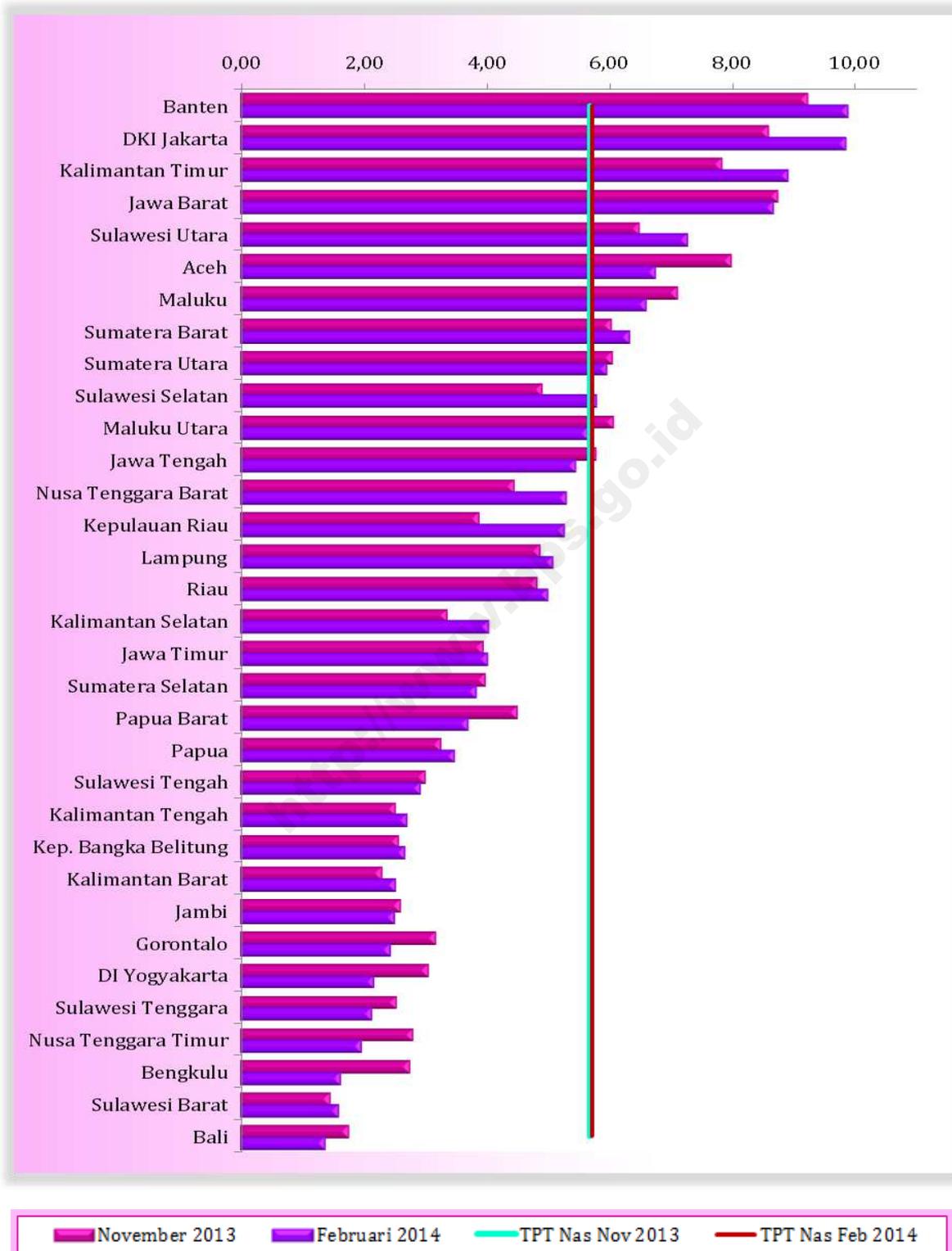
Tabel 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2013–2014 (persen)

TPT	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,17	5,67	5,70
Laki-laki	6,02	5,34	5,62
Perempuan	6,40	6,21	5,84
Perkotaan	7,31	7,00	6,97
Perdesaan	5,08	4,38	4,48

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT pada periode Februari 2014 bila dibandingkan dengan November 2013 hanya terjadi pada kelompok perempuan yang turun sebesar 0,37 persen poin, sedangkan pada kelompok laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,28 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama, penurunan terjadi di daerah perkotaan sebesar 0,03 persen poin, sedangkan di daerah perdesaan mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen poin.

Sementara itu, seiring penurunan TPT secara nasional pada Februari 2014 bila dibandingkan dengan Agustus 2013, penurunan juga terjadi baik menurut jenis kelamin maupun wilayah tempat tinggal. Penurunan TPT pada kelompok laki-laki sebesar 0,40 persen poin, sedangkan pada kelompok perempuan turun sebesar 0,56 persen poin. Begitu pula di wilayah perkotaan dan perdesaan yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,34 persen poin dan 0,60 persen poin.

Grafik 12. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi, November 2013 dan Februari 2014 (persen)



Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Banten (9,87 persen), Provinsi DKI Jakarta (9,84 persen), dan Provinsi Kalimantan Timur (8,89 persen). Sedangkan hasil Sakernas November 2013 posisi tersebut diduduki oleh Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DKI Jakarta, dengan TPT masing-masing sebesar 9,23 persen, 8,75 persen, dan 8,60 persen. Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas Februari 2014 diduduki oleh Provinsi Bali dengan TPT sebesar 1,37

persen, kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat dengan TPT 1,60 persen, dan posisi ketiga diduduki Provinsi Bengkulu dengan TPT sebesar 1,62 persen. Sementara itu, peringkat tiga provinsi dengan TPT terendah berdasarkan Sakernas November 2013 diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (1,46 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Bali (1,77 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi Kalimantan Barat (2,30 persen). (selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 12).

<http://www.bps.go.id>

5.2. KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun keatas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 17,05 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 17 orang yang menganggur. Angka tersebut turun baik bila dibandingkan dengan hasil Sakernas November maupun Agustus 2013, dengan penurunan masing-masing sebesar 2,19 persen poin dan 4,53 persen poin, seperti yang terlihat pada Tabel 13. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, baik pada Agustus maupun November 2013

menunjukkan bahwa TPT penduduk umur muda pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada TPT pada laki-laki, akan tetapi keadaan pada Februari 2014 berbeda, yang menunjukkan bahwa TPT umur muda laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Februari 2014 mengalami penurunan baik bila dibandingkan dengan November maupun Agustus 2013 dengan penurunan pada kelompok perempuan lebih tinggi daripada kelompok laki-laki. Sebagai gambaran, TPT umur muda perempuan mengalami penurunan sebesar 4,28 persen poin, sedangkan laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,87 persen poin (periode November 2013–Februari 2014).

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan pola bahwa TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Februari 2014, TPT daerah perkotaan mencapai 19,18 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 14,85 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 19 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan hanya sekitar 15 orang.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Februari 2014 sebesar 5,13 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan penurunan TPT umur muda pada Februari 2014 baik bila dibandingkan dengan November maupun Agustus 2013, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,80 poin dan 2,26 poin. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, rasio TPT umur muda terhadap TPT

penduduk dewasa pada laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan pada perempuan seperti ditunjukkan berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 dan November 2013, namun hal ini tidak berlaku pada Agustus 2013, dimana rasio ini terlihat lebih tinggi pada kelompok perempuan daripada laki-laki. Sementara apabila dilihat menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 13. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2013–2014

Indikator	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
TPT Penduduk Umur Muda (%)	21,58	19,24	17,05
Laki-laki	21,23	18,27	17,40
Perempuan	22,12	20,77	16,49
Perkotaan	23,41	21,74	19,18
Perdesaan	19,75	16,62	14,85
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	7,39	6,93	5,13
Laki-laki	7,25	7,02	5,54
Perempuan	7,62	6,79	4,56
Perkotaan	6,15	5,84	4,45
Perdesaan	9,47	8,90	6,23
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur (%)	60,88	59,65	51,76
Laki-laki	59,59	59,78	53,78
Perempuan	62,89	59,47	48,68
Perkotaan	57,24	56,50	49,20
Perdesaan	65,88	64,59	55,64
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penduduk Umur Muda (%)	10,43	9,72	8,49
Laki-laki	12,25	11,15	10,52
Perempuan	8,55	8,25	6,40
Perkotaan	10,95	10,85	9,38
Perdesaan	9,86	8,50	7,53

Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 cukup tinggi yaitu 51,76 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Februari 2014, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 52 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun.

Seperti yang terlihat pada Tabel 13, angka ini mengalami penurunan sebesar 7,89 persen poin bila dibandingkan dengan November 2013 (59,65 persen), dan turun

sebesar 9,12 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 (60,88 persen).

Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Februari 2014 sebesar 8,49 persen atau turun dari angka November maupun Agustus 2013. *Share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda sebesar 8,49 persen ini dapat diartikan bahwa pada Februari 2014 dari 100 penduduk umur muda sebanyak 8 orang diantaranya menganggur.

<http://www.bps.go.id>

5.3. KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika dikonfirmasi bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, reaksi politik yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 8,42 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 2,53 persen (Tabel 14).

Seiring dengan kenaikan TPT nasional periode Februari 2014 dibandingkan dengan November 2013, kenaikan TPT menurut tingkat pendidikan juga terjadi pada jenjang pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar dengan kenaikan masing-masing sebesar 0,75 persen poin dan 0,24 persen poin. Sementara penurunan TPT terjadi pada tingkat sekolah menengah dan tingkat sekolah tinggi dengan penurunan masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 1,00 persen poin bila dibandingkan dengan periode yang sama.

Berdasarkan jenis kelamin, penurunan TPT pada tingkat pendidikan sekolah tinggi periode Februari 2014 dibandingkan dengan November 2013 tampak lebih tinggi terjadi pada kelompok perempuan yang turun sebesar 1,30 persen poin, sedangkan pada laki-laki turun 0,72 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa pada tingkat pendidikan dan periode yang sama, terjadi penurunan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan dengan penurunan masing-masing sebesar 1,12 persen poin dan 0,60 persen poin.

Tabel 14. TPT Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014 (persen)

Tingkat Pendidikan	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	6,17	5,67	5,70
Tidak Pernah Sekolah	1,47	1,78	2,53
Laki-laki	1,44	2,58	3,07
Perempuan	1,49	1,17	2,13
Perkotaan	3,69	4,19	5,66
Perdesaan	0,92	1,13	1,65
Sekolah Dasar	4,87	4,67	4,91
Laki-laki	4,93	4,45	4,87
Perempuan	4,77	5,02	4,98
Perkotaan	6,03	6,26	6,63
Perdesaan	4,15	3,64	3,82
Sekolah Menengah	10,26	8,63	8,42
Laki-laki	9,21	7,60	7,82
Perempuan	12,44	10,77	9,66
Perkotaan	9,86	8,58	8,40
Perdesaan	11,12	8,74	8,45
Sekolah Tinggi	5,55	5,72	4,72
Laki-laki	5,06	5,13	4,41
Perempuan	6,13	6,37	5,07
Perkotaan	5,60	5,93	4,81
Perdesaan	5,36	5,05	4,45

Secara keseluruhan pada periode Februari 2014 bila dibandingkan dengan November 2013, kenaikan TPT terbesar terdapat pada mereka yang tidak pernah sekolah yang tinggal di wilayah perkotaan dengan kenaikan sebesar 1,47 persen poin. Pada November 2013, TPT pada kelompok ini sebesar 4,19 persen, sedangkan pada Februari 2014 meningkat menjadi 5,66 persen.

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 15 memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Berdasarkan data Sakernas baik pada Agustus, November 2013, maupun Februari 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur terbanyak pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Seperti pada Februari 2014, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah dasar mencapai 51,47 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 2,14 persen poin jika dibandingkan November 2013 (49,33 persen), dan naik sebesar 3,89 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2013 (47,58 persen).

Selama periode November 2013–Februari 2014, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan tingkat sekolah tinggi dengan penurunan masing-masing sebesar 1,03 persen poin dan 1,64 persen poin. Penurunan persentase penganggur pada tingkat sekolah menengah maupun tinggi terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal.

Mengamati lebih lanjut Tabel 15, baik pada keadaan Agustus, November 2013, maupun Februari 2014, persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Februari 2014, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 10,62 persen, sementara diantara seluruh

penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi hanya sebesar 6,79 persen.

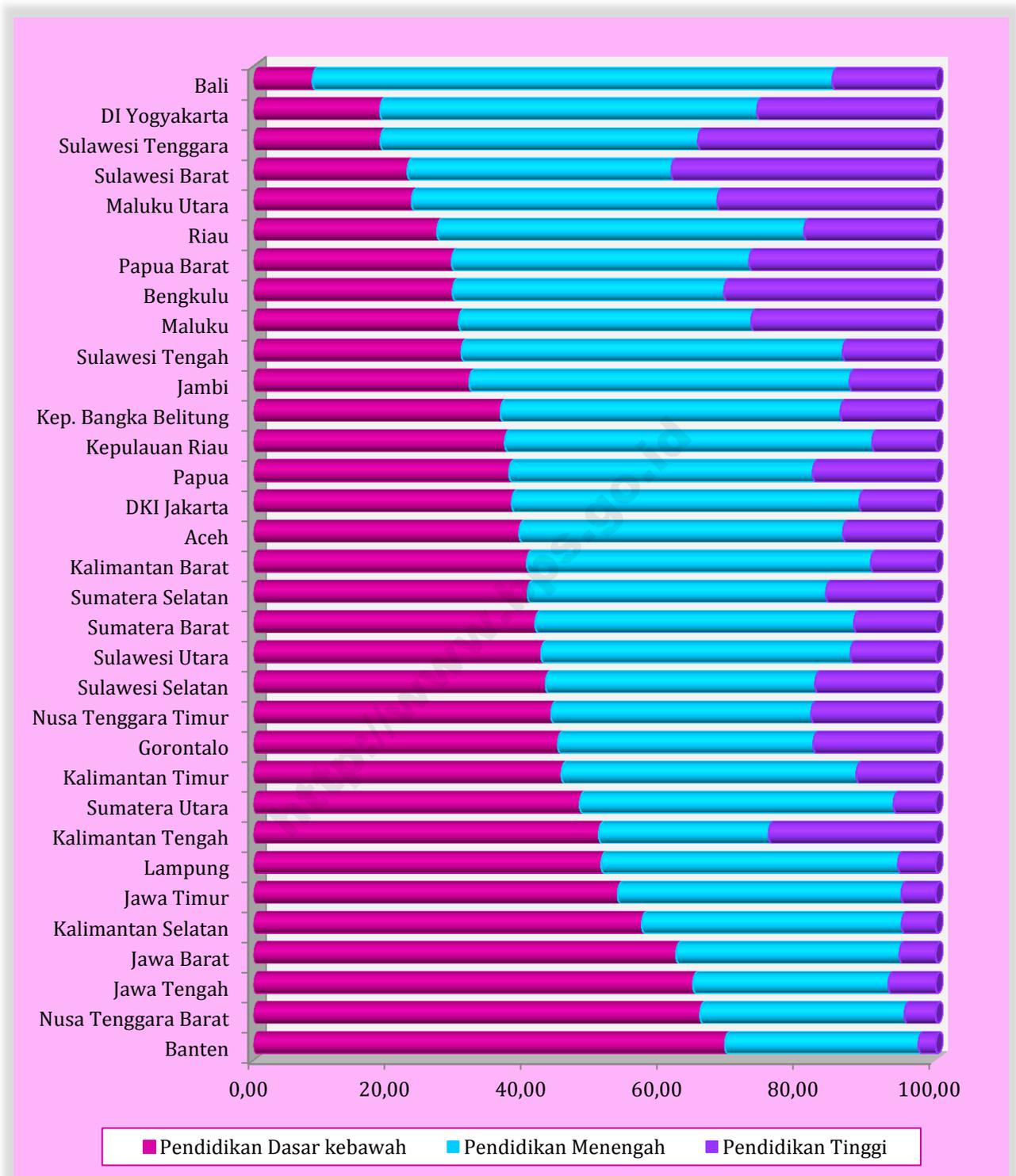
Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Februari 2014, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 15, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 2,40 persen dan 61,64 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 1,53 persen dan 44,75 persen.

Grafik 13 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada Februari 2014, yaitu Provinsi Banten (69,12 persen), disusul oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (65,49 persen), dan Provinsi Jawa Tengah (64,45 persen) berada pada urutan ketiga. Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Sulawesi Barat (38,73 persen), Provinsi Sulawesi Tenggara (34,83 persen) dan Provinsi Maluku Utara (32,01 persen).

Tabel 15. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014

Tingkat Pendidikan	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	1,10	1,35	1,88
Laki-laki	0,79	1,47	1,59
Perempuan	1,58	1,19	2,31
Perkotaan	0,96	1,11	1,53
Perdesaan	1,30	1,73	2,40
Sekolah Dasar	47,58	49,33	51,47
Laki-laki	49,54	50,19	51,88
Perempuan	44,54	48,13	50,84
Perkotaan	39,00	42,47	44,75
Perdesaan	59,34	60,05	61,64
Sekolah Menengah	42,96	39,38	38,35
Laki-laki	42,86	40,27	39,74
Perempuan	43,13	38,16	36,23
Perkotaan	48,85	43,55	43,14
Perdesaan	34,88	32,86	31,09
Sekolah Tinggi	8,36	9,94	8,30
Laki-laki	6,81	8,07	6,79
Perempuan	10,75	12,52	10,62
Perkotaan	11,19	12,87	10,58
Perdesaan	4,48	5,36	4,87

Grafik 13. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, Februari 2014



5.4. KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (<35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Februari 2014, mencapai 10,57 juta orang (Tabel 16), yang terdiri dari 6,35 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan

sisanya sebanyak 4,22 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut perbedaan klasifikasi desa-kota, pada Februari 2014, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 7,06 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebesar 3,51 juta orang.

Tabel 16. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Setengah Penganggur, 2013–2014 (dalam juta)

Setengah Penganggur	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	11,00	9,98	10,57
Laki-laki	7,35	6,16	6,35
Perempuan	3,65	3,82	4,22
Perkotaan	3,49	3,30	3,51
Perdesaan	7,51	6,68	7,06

Pada periode Sakernas November 2013 dibandingkan dengan hasil Sakernas Februari 2014 menunjukkan adanya kenaikan jumlah setengah penganggur sebanyak 590 ribu orang. Kenaikan angka secara nasional ini diikuti kenaikan jumlah setengah penganggur pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang masing-masing naik sebanyak 190 ribu orang dan 400 ribu orang. Kenaikan jumlah setengah penganggur juga terjadi baik di wilayah

perkotaan maupun perdesaan yang masing-masing naik sejumlah 210 ribu orang dan 380 ribu orang.

Sementara itu, persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Februari 2014 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan November 2013, tetapi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2013 seperti yang terlihat pada Tabel 17 berikut ini.

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Februari 2014 sebesar 8,43 persen atau naik 0,43 persen poin bila dibanding November 2013 (8,00 persen), dan turun 0,72 persen poin bila dibanding Agustus 2013 (9,15 persen). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada Agustus 2013, dari 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan

kerja, terdapat sebanyak 9 orang setengah penganggur, sedangkan pada November 2013 turun menjadi sekitar 8 orang setengah penganggur, dan kondisi ini masih relatif tetap Februari 2014 karena hanya mengalami sedikit kenaikan persentase jumlah setengah penganggur, yaitu sekitar 8 orang setengah penganggur per 100 orang angkatan kerja.

Tabel 17. Indikator Setengah Penganggur, 2013–2014

Indikator	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	9,15	8,00	8,43
Laki-laki	9,82	8,02	8,27
Perempuan	8,05	7,98	8,70
Perkotaan	5,95	5,35	5,68
Perdesaan	12,21	10,60	11,11
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	9,76	8,48	8,94
Laki-laki	10,45	8,47	8,76
Perempuan	8,60	8,51	9,23
Perkotaan	6,42	5,76	6,10
Perdesaan	12,86	11,08	11,63

Pada Februari 2014, persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan November 2013, tetapi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2013. Pada Agustus 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja sebanyak 10 orang diantaranya adalah setengah penganggur, sedangkan pada November 2013 turun menjadi 8 orang, dan pada Februari 2014 naik menjadi sejumlah 9 orang setengah penganggur per 100 orang

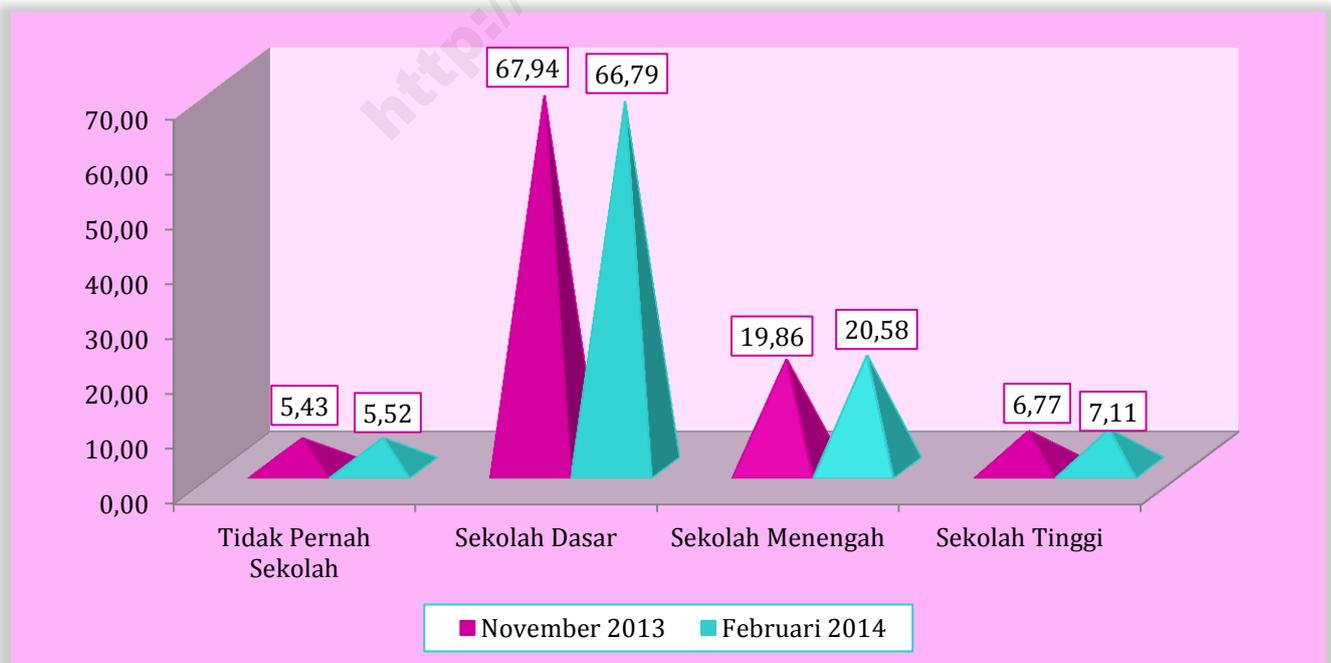
penduduk bekerja. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin selama Sakernas periode November 2013–Februari 2014, kenaikan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terdapat pada kelompok laki-laki maupun perempuan. Sebagai gambaran, pada November 2013, dari 100 orang penduduk yang bekerja, terdapat 8 orang laki-laki yang termasuk setengah penganggur, sedangkan pada Februari 2014, naik menjadi sebanyak 9 orang.

Sementara itu, apabila ditinjau berdasarkan klasifikasi wilayah, selama periode November 2013–Februari 2014 kenaikan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pada Februari 2014 bila dibandingkan dengan November 2013, terjadi kenaikan sebesar 0,55 persen poin di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan kenaikan hanya mencapai 0,34 persen poin.

Masih merujuk pada hasil Sakernas Februari 2014 (Grafik 14), kenaikan persentase setengah penganggur menurut tingkat pendidikan terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, kecuali pada tingkat pendidikan sekolah dasar yang mengalami penurunan

sebesar 1,15 persen poin (dibandingkan keadaan November 2013). Penurunan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan penurunan persentase setengah penganggur baik berdasarkan jenis kelamin maupun perbedaan klasifikasi wilayah kota-desa. Penurunan pada kelompok laki-laki sebesar 0,94 persen poin, sedangkan pada kelompok perempuan turun sebesar 1,24 persen poin. Sementara penurunan persentase setengah penganggur di wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing mencapai 2,12 persen poin dan 0,65 persen poin. Sebaliknya, kenaikan terbesar persentase setengah penganggur menurut pendidikan pada periode ini terdapat pada tingkat pendidikan sekolah menengah yang naik sebesar 0,72 persen poin.

Grafik 14. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, November 2013 dan Februari 2014



Tabel 18. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014

Tingkat Pendidikan	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	5,80	5,43	5,52
Laki-laki	4,26	4,51	4,03
Perempuan	8,90	6,91	7,76
Perkotaan	2,17	2,38	2,93
Perdesaan	7,49	6,93	6,80
Sekolah Dasar	69,28	67,94	66,79
Laki-laki	71,82	70,23	69,29
Perempuan	64,16	64,25	63,01
Perkotaan	60,90	59,01	56,89
Perdesaan	73,16	72,36	71,71
Sekolah Menengah	19,81	19,86	20,58
Laki-laki	20,30	20,60	22,02
Perempuan	18,83	18,67	18,42
Perkotaan	27,84	27,66	28,33
Perdesaan	16,09	16,01	16,74
Sekolah Tinggi	5,11	6,77	7,11
Laki-laki	3,62	4,66	4,66
Perempuan	8,11	10,17	10,81
Perkotaan	9,09	10,95	11,85
Perdesaan	3,26	4,70	4,75

5.5. KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 30,83 persen, artinya dari 100 persen penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 30,83 persen.

Hasil Sakernas Agustus, November 2013, dan Februari 2014 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan tingkat ketidakaktifan. Jika dibandingkan dengan November 2013, tingkat ketidakaktifan pada Februari 2014 mengalami penurunan sebesar 0,09 persen poin, dan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2013 turun sebesar 2,40 persen poin. Meski terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan (Sakernas November 2013–Februari 2014), akan tetapi jumlah penduduk umur 15 tahun keatas yang tergolong bukan angkatan kerja mengalami sedikit kenaikan,

yaitu sebanyak 20 ribu orang dari 55,83 juta orang pada November 2013 menjadi 55,85 juta orang pada Februari 2014.

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 15 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 47 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan November 2013, terjadi penurunan tingkat ketidakaktifan pada perempuan sebesar 0,43 persen poin, sedangkan pada laki-laki naik sebesar 0,26 persen poin.

Tabel 19. Indikator Ketidakaktifan, 2013–2014
(persen)

Tingkat ketidakaktifan	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	33,23	30,92	30,83
Laki-laki	16,63	14,70	14,96
Perempuan	49,74	47,06	46,63
Perkotaan	35,80	32,64	32,82
Perdesaan	30,58	29,15	28,77

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Februari 2014 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 32,82 persen, sementara di daerah perdesaan hanya sebesar 28,77 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Februari 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen poin bila dibandingkan keadaan November 2013. Sementara di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,38 persen poin, yaitu dari 29,15 persen pada November 2013 menjadi 28,77 persen pada Februari 2014.

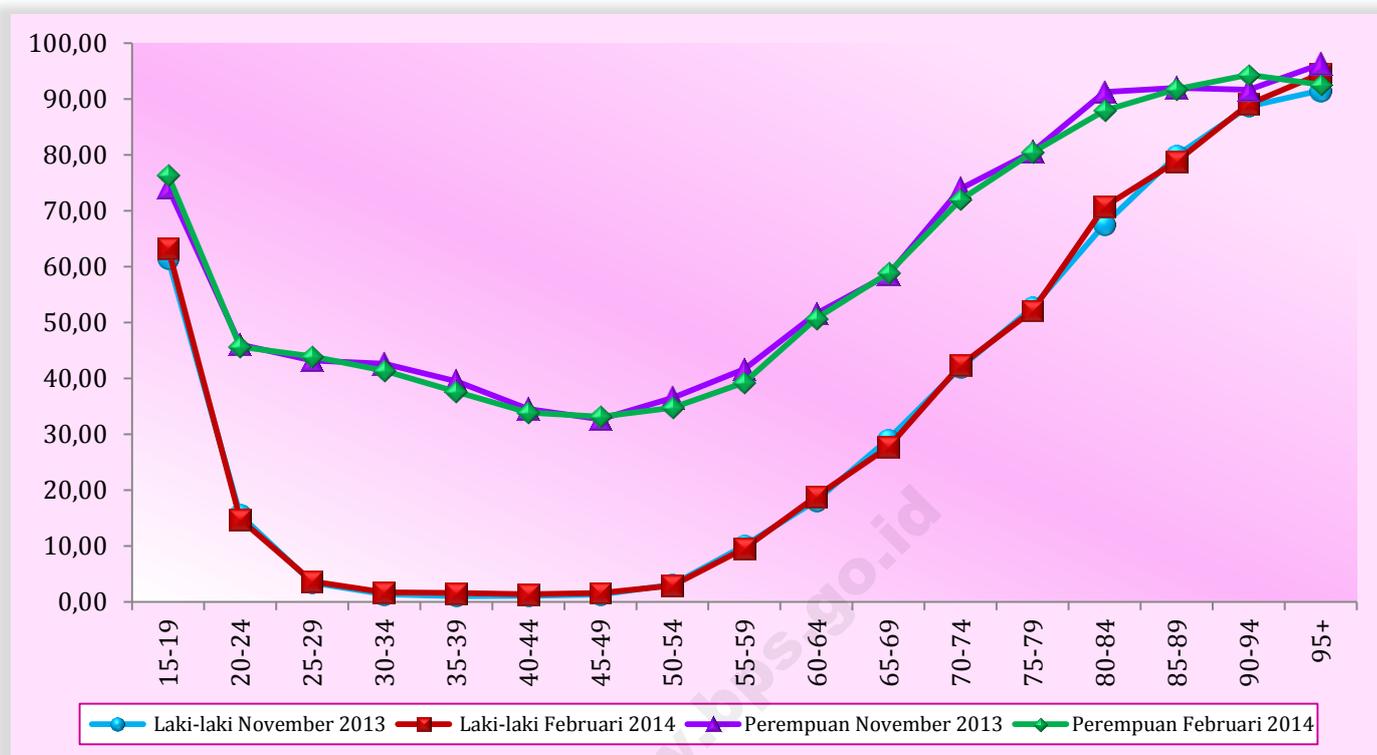
Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 15 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf "J").

Berdasarkan Grafik 15 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan

menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2014, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 63,28 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,38 persen pada kelompok umur (40–44) tahun. Tingkat ketidakaktifan laki-laki kembali meningkat dimulai pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 76,39 persen, kemudian tingkat ketidakaktifan perempuan mulai terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45–49) tahun yaitu sebesar 33,10 persen. Tingkat ketidakaktifan perempuan kembali meningkat pada kelompok umur (50–54) tahun.

Grafik 15. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, November 2013 dan Februari 2014 (persen)



6. INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (ISCED). Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

Berdasarkan hasil Sakernas Februari 2014, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada November 2013. Angkatan kerja pada Februari 2014 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar

59,76 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 25,98 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 10,03 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 4,23 persen (Tabel 20).

Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Februari 2014, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 12,22 persen dibandingkan 8,56 persen.

Grafik 16 menggambarkan angkatan kerja menurut tingkat pendidikan dalam beberapa kelompok umur. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa pada kelompok usia muda, baik pada November 2013 maupun Februari 2014, persentase angkatan kerja didominasi oleh mereka yang menamatkan pendidikan sekolah dasar (mencapai 50 persen lebih), kemudian disusul pada jenjang sekolah menengah.

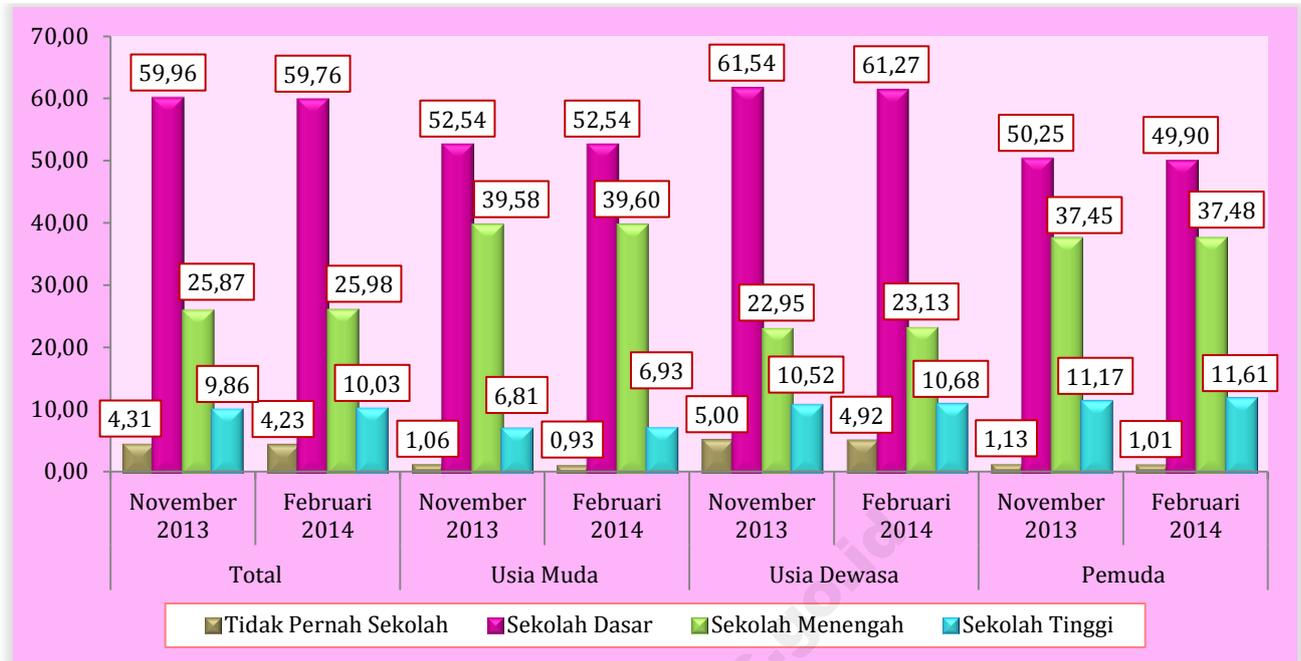
Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.

Sementara itu, seperti tampak pada Grafik 17, pada Februari 2014, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.

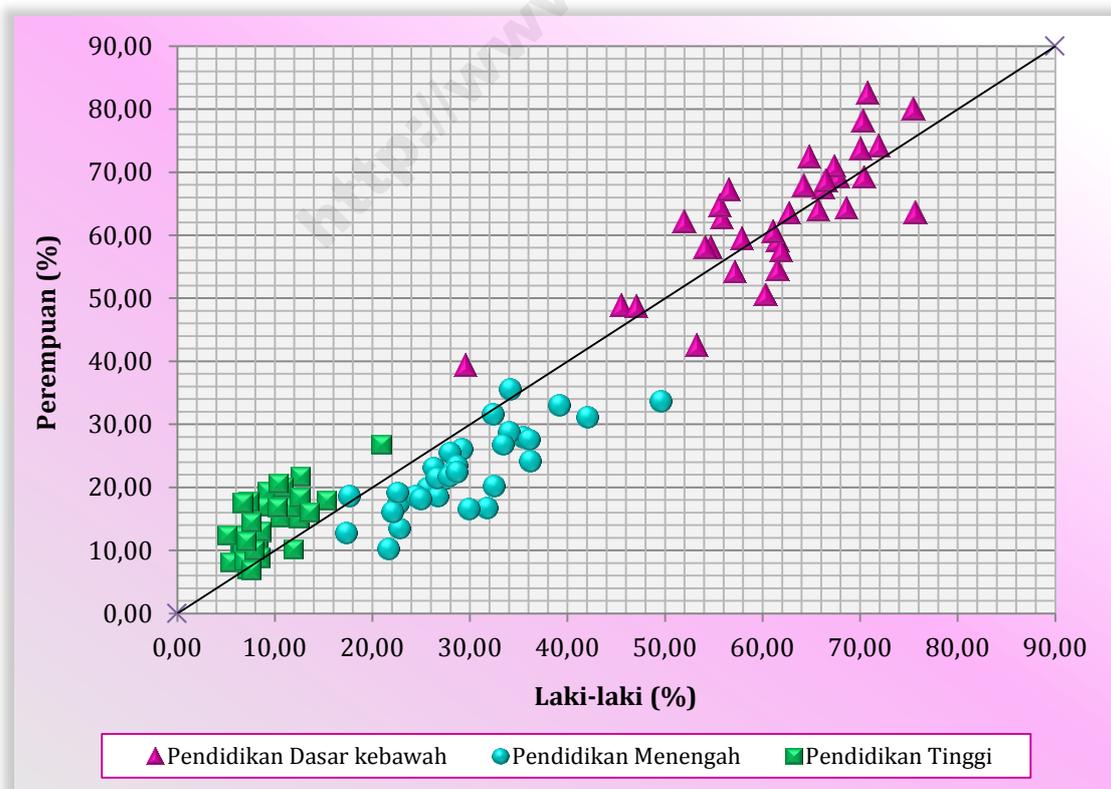
Tabel 20. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2013–2014

Tingkat Pendidikan	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	4,60	4,31	4,23
Laki-laki	3,29	3,04	2,92
Perempuan	6,78	6,35	6,31
Perkotaan	1,89	1,86	1,88
Perdesaan	7,19	6,70	6,51
Sekolah Dasar	60,29	59,96	59,76
Laki-laki	60,58	60,26	59,87
Perempuan	59,80	59,46	59,59
Perkotaan	47,31	47,45	47,04
Perdesaan	72,65	72,20	72,13
Sekolah Menengah	25,82	25,87	25,98
Laki-laki	28,02	28,29	28,56
Perempuan	22,19	21,99	21,88
Perkotaan	36,21	35,50	35,77
Perdesaan	15,92	16,45	16,46
Sekolah Tinggi	9,29	9,86	10,03
Laki-laki	8,11	8,41	8,65
Perempuan	11,23	12,20	12,22
Perkotaan	14,59	15,19	15,31
Perdesaan	4,24	4,65	4,90

Grafik 16. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, November 2013 dan Februari 2014



Grafik 17. Perbandingan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, Februari 2014



<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014
(dalam ribu)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 626	1 668	3 294	1 635	1 676	3 311	1 643	1 685	3 327
Sumatera Utara	4 537	4 668	9 205	4 553	4 683	9 236	4 566	4 698	9 264
Sumatera Barat	1 729	1 794	3 523	1 734	1 800	3 535	1 740	1 806	3 546
Riau	2 128	2 008	4 135	2 141	2 020	4 162	2 155	2 033	4 188
Jambi	1 198	1 143	2 340	1 203	1 148	2 351	1 208	1 153	2 361
Sumatera Selatan	2 811	2 738	5 549	2 821	2 749	5 569	2 831	2 758	5 589
Bengkulu	657	633	1 290	660	636	1 296	663	639	1 302
Lampung	2 914	2 764	5 678	2 923	2 772	5 695	2 932	2 780	5 711
Kep. Bangka Belitung	495	453	949	498	456	954	500	458	959
Kepulauan Riau	662	634	1 296	667	638	1 305	672	643	1 315
DKI Jakarta	3 778	3 758	7 537	3 789	3 769	7 557	3 799	3 778	7 577
Jawa Barat	16 591	16 234	32 825	16 653	16 295	32 948	16 715	16 358	33 073
Jawa Tengah	12 199	12 682	24 882	12 223	12 707	24 929	12 247	12 731	24 978
DI Yogyakarta	1 375	1 438	2 813	1 379	1 442	2 822	1 383	1 446	2 830
Jawa Timur	14 283	15 000	29 283	14 305	15 024	29 329	14 329	15 048	29 377
Banten	4 152	4 001	8 153	4 175	4 023	8 199	4 198	4 045	8 243
Bali	1 523	1 525	3 048	1 528	1 529	3 057	1 533	1 534	3 066
Nusa Tenggara Barat	1 552	1 728	3 280	1 558	1 734	3 292	1 563	1 740	3 302
Nusa Tenggara Timur	1 558	1 633	3 192	1 565	1 641	3 206	1 571	1 648	3 219
Kalimantan Barat	1 657	1 597	3 254	1 664	1 604	3 267	1 670	1 611	3 281
Kalimantan Tengah	889	802	1 692	894	807	1 701	899	812	1 711
Kalimantan Selatan	1 381	1 361	2 742	1 387	1 367	2 754	1 393	1 373	2 766
Kalimantan Timur	1 455	1 289	2 744	1 465	1 297	2 761	1 474	1 305	2 779
Sulawesi Utara	888	856	1 744	890	858	1 748	892	861	1 753
Sulawesi Tengah	1 006	966	1 973	1 011	970	1 981	1 015	974	1 989
Sulawesi Selatan	2 821	3 078	5 899	2 829	3 086	5 914	2 836	3 094	5 930
Sulawesi Tenggara	786	797	1 582	790	801	1 591	794	805	1 599
Gorontalo	387	392	779	389	394	783	390	396	786
Sulawesi Barat	415	421	836	416	423	840	419	425	844
Maluku	539	540	1 080	542	543	1 084	544	545	1 089
Maluku Utara	375	360	735	377	362	739	379	364	743
Papua Barat	300	264	564	304	266	570	306	268	574
Papua	1 105	967	2 073	1 113	974	2 087	1 118	979	2 097
Indonesia	89 775	90 192	179 967	90 078	90 495	180 573	90 378	90 792	181 170

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun keatas Menurut Kelompok Umur, 2013–2014
(dalam juta)

Kelompok Umur (1)	2013		2014
	Agustus (2)	November (3)	Februari (4)
15 Tahun keatas	179,97	180,57	177,23
Laki-laki	89,78	90,08	88,48
Perempuan	90,19	90,49	88,76
Perkotaan	91,30	91,62	90,15
Perdesaan	88,67	88,95	87,09
(15–24)	43,28	43,43	43,58
Laki-laki	21,92	22,00	22,08
Perempuan	21,35	21,43	21,50
Perkotaan	22,40	22,48	22,57
Perdesaan	20,88	20,95	21,01
(15–64)	167,08	167,95	168,57
Laki-laki	84,00	84,43	84,75
Perempuan	83,08	83,51	83,81
Perkotaan	85,42	86,02	86,34
Perdesaan	81,66	81,93	82,23
(25–54)	106,62	106,98	107,34
Laki-laki	53,37	53,55	53,73
Perempuan	53,25	53,42	53,60
Perkotaan	54,74	54,93	55,13
Perdesaan	51,88	52,05	52,20
(25–34)	41,11	41,25	41,39
Laki-laki	20,51	20,58	20,65
Perempuan	20,60	20,67	20,74
Perkotaan	21,60	21,68	21,76
Perdesaan	19,51	19,57	19,63
(35–54)	65,51	65,73	65,95
Laki-laki	32,87	32,98	33,09
Perempuan	32,65	32,75	32,86
Perkotaan	33,14	33,25	33,37
Perdesaan	32,38	32,48	32,57
(55–64)	17,18	17,54	17,66
Laki-laki	8,70	8,88	8,95
Perempuan	8,48	8,66	8,71
Perkotaan	8,28	8,61	8,64
Perdesaan	8,90	8,93	9,01
65 Tahun keatas	12,89	12,63	12,60
Laki-laki	5,77	5,65	5,62
Perempuan	7,12	6,98	6,98
Perkotaan	5,88	5,60	5,62
Perdesaan	7,01	7,02	6,98

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014
(dalam ribu)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 302	748	2 050	1 365	776	2 141	1 363	810	2 173
Sumatera Utara	3 882	2 619	6 501	3 893	2 829	6 722	3 895	2 871	6 766
Sumatera Barat	1 362	855	2 217	1 486	1 024	2 509	1 487	1 015	2 503
Riau	1 763	860	2 623	1 828	990	2 819	1 844	957	2 801
Jambi	991	476	1 467	1 025	545	1 571	1 020	551	1 570
Sumatera Selatan	2 322	1 382	3 704	2 383	1 491	3 874	2 440	1 582	4 022
Bengkulu	542	330	872	567	379	945	569	399	968
Lampung	2 442	1 239	3 681	2 591	1 433	4 024	2 571	1 458	4 029
Kep. Bangka Belitung	425	195	620	432	214	646	433	208	641
Kepulauan Riau	573	282	854	583	302	885	593	299	892
DKI Jakarta	3 187	1 922	5 109	3 247	1 977	5 224	3 230	1 959	5 189
Jawa Barat	13 844	6 777	20 621	14 275	7 073	21 348	14 182	7 105	21 287
Jawa Tengah	10 222	7 302	17 524	10 477	7 415	17 891	10 399	7 318	17 716
DI Yogyakarta	1 072	877	1 949	1 106	931	2 037	1 075	958	2 033
Jawa Timur	12 098	8 334	20 432	12 145	8 362	20 507	12 242	8 475	20 718
Banten	3 456	1 726	5 182	3 580	1 919	5 499	3 540	1 939	5 479
Bali	1 270	1 014	2 284	1 300	1 076	2 376	1 299	1 111	2 410
Nusa Tenggara Barat	1 246	900	2 146	1 298	913	2 210	1 340	995	2 335
Nusa Tenggara Timur	1 245	930	2 175	1 282	1 022	2 304	1 302	1 081	2 383
Kalimantan Barat	1 382	880	2 263	1 433	966	2 398	1 422	947	2 369
Kalimantan Tengah	762	397	1 159	781	456	1 237	790	458	1 248
Kalimantan Selatan	1 179	722	1 900	1 240	770	2 010	1 233	785	2 018
Kalimantan Timur	1 229	514	1 742	1 265	604	1 868	1 279	645	1 924
Sulawesi Utara	717	319	1 036	764	393	1 157	768	392	1 159
Sulawesi Tengah	852	441	1 293	865	523	1 388	874	554	1 428
Sulawesi Selatan	2 260	1 298	3 558	2 330	1 319	3 650	2 330	1 348	3 678
Sulawesi Tenggara	642	401	1 043	665	450	1 115	673	463	1 136
Gorontalo	315	164	479	323	201	524	323	197	521
Sulawesi Barat	345	214	559	354	245	599	356	245	601
Maluku	416	252	669	434	300	734	439	289	728
Maluku Utara	308	165	473	313	174	488	311	182	493
Papua Barat	242	134	376	249	141	389	258	150	408
Papua	951	659	1 610	957	694	1 651	977	712	1 689
Indonesia	74 844	45 328	120 172	76 834	47 908	124 743	76 859	48 458	125 317

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Angkatan Kerja
Menurut Kelompok Umur, 2013–2014
(dalam juta)

Kelompok Umur	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun keatas	120,17	124,74	125,32
Laki-laki	74,84	76,83	76,86
Perempuan	45,33	47,91	48,46
Perkotaan	58,62	61,72	61,78
Perdesaan	61,55	63,03	63,54
(15–24)	20,90	21,94	21,70
Laki-laki	12,65	13,42	13,35
Perempuan	8,25	8,51	8,35
Perkotaan	10,48	11,22	11,04
Perdesaan	10,43	10,72	10,66
(15–64)	115,36	119,65	120,15
Laki-laki	71,76	73,66	73,67
Perempuan	43,60	45,99	46,48
Perkotaan	56,86	59,92	59,94
Perdesaan	58,50	59,72	60,21
(25–54)	82,86	85,34	85,85
Laki-laki	51,76	52,56	52,59
Perempuan	31,10	32,79	33,27
Perkotaan	41,41	43,20	43,36
Perdesaan	41,45	42,14	42,49
(25–34)	30,91	31,88	31,99
Laki-laki	19,73	20,08	20,09
Perempuan	11,19	11,80	11,90
Perkotaan	16,15	16,81	16,81
Perdesaan	14,76	15,07	15,18
(35–54)	51,94	53,46	53,86
Laki-laki	32,03	32,47	32,49
Perempuan	19,91	20,98	21,37
Perkotaan	25,26	26,39	26,55
Perdesaan	26,69	27,07	27,31
(55–64)	11,60	12,37	12,60
Laki-laki	7,35	7,68	7,74
Perempuan	4,25	4,69	4,86
Perkotaan	4,97	5,50	5,54
Perdesaan	6,63	6,87	7,06
65 Tahun keatas	4,81	5,09	5,17
Laki-laki	3,08	3,17	3,19
Perempuan	1,73	1,92	1,98
Perkotaan	1,76	1,79	1,83
Perdesaan	3,05	3,30	3,33

Lampiran 5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2013–2014
(persen)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	80,05	44,87	62,24	83,48	46,30	64,66	83,00	48,08	65,32
Sumatera Utara	85,56	56,10	70,62	85,51	60,41	72,78	85,31	61,11	73,04
Sumatera Barat	78,79	47,63	62,92	85,68	56,85	71,00	85,49	56,22	70,58
Riau	82,88	42,83	63,44	85,39	49,02	67,73	85,57	47,08	66,88
Jambi	82,73	41,66	62,68	85,25	47,51	66,82	84,40	47,75	66,51
Sumatera Selatan	82,60	50,48	66,75	84,47	54,26	69,56	86,20	57,34	71,96
Bengkulu	82,49	52,13	67,59	85,84	59,50	72,91	85,89	62,44	74,38
Lampung	83,81	44,83	64,84	88,64	51,69	70,66	87,70	52,45	70,55
Kep. Bangka Belitung	85,79	43,09	65,38	86,87	46,89	67,75	86,48	45,40	66,84
Kepulauan Riau	86,51	44,43	65,92	87,36	47,34	67,79	88,20	46,55	67,83
DKI Jakarta	84,35	51,14	67,79	85,71	52,45	69,13	85,04	51,85	68,49
Jawa Barat	83,44	41,74	62,82	85,72	43,41	64,79	84,84	43,44	64,36
Jawa Tengah	83,79	57,58	70,43	85,71	58,35	71,77	84,91	57,48	70,93
DI Yogyakarta	77,95	61,01	69,29	80,16	64,56	72,19	77,70	66,24	71,84
Jawa Timur	84,71	55,56	69,78	84,90	55,66	69,92	85,44	56,32	70,52
Banten	83,23	43,13	63,55	85,75	47,71	67,08	84,33	47,94	66,47
Bali	83,35	66,52	74,93	85,10	70,35	77,72	84,78	72,43	78,61
Nusa Tenggara Barat	80,24	52,11	65,42	83,30	52,64	67,15	85,76	57,19	70,71
Nusa Tenggara Timur	79,89	56,95	68,15	81,93	62,28	71,87	82,88	65,60	74,04
Kalimantan Barat	83,43	55,12	69,53	86,12	60,21	73,40	85,15	58,79	72,21
Kalimantan Tengah	85,73	49,41	68,50	87,35	56,52	72,73	87,82	56,42	72,93
Kalimantan Selatan	85,35	53,04	69,31	89,42	56,35	73,01	88,51	57,16	72,95
Kalimantan Timur	84,43	39,86	63,50	86,34	46,55	67,65	86,77	49,43	69,23
Sulawesi Utara	80,73	37,28	59,41	85,83	45,85	66,20	86,04	45,50	66,14
Sulawesi Tengah	84,67	45,65	65,56	85,58	53,89	70,07	86,08	56,91	71,79
Sulawesi Selatan	80,12	42,18	60,32	82,39	42,76	61,71	82,15	43,56	62,02
Sulawesi Tenggara	81,76	50,28	65,91	84,23	56,17	70,10	84,77	57,54	71,05
Gorontalo	81,26	41,89	61,46	83,07	51,10	66,98	82,82	49,89	66,25
Sulawesi Barat	83,24	50,69	66,83	84,89	57,97	71,32	85,02	57,56	71,18
Maluku	77,21	46,68	61,93	80,11	55,29	67,69	80,72	52,99	66,84
Maluku Utara	82,16	45,79	64,35	83,09	48,23	66,02	82,11	50,09	66,43
Papua Barat	80,53	50,90	66,69	81,76	52,93	68,31	84,19	56,01	71,05
Papua	86,06	68,15	77,70	85,96	71,26	79,10	87,41	72,69	80,54
Indonesia	83,37	50,26	66,77	85,30	52,94	69,08	85,04	53,37	69,17

Lampiran 6. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (dalam ribu)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 185	657	1 843	1 261	709	1 970	1 274	752	2 027
Sumatera Utara	3 664	2 417	6 081	3 688	2 627	6 314	3 703	2 661	6 364
Sumatera Barat	1 267	794	2 061	1 405	953	2 358	1 401	944	2 344
Riau	1 684	795	2 479	1 745	937	2 683	1 764	897	2 661
Jambi	951	446	1 397	999	531	1 530	998	533	1 531
Sumatera Selatan	2 202	1 323	3 525	2 285	1 435	3 720	2 337	1 530	3 868
Bengkulu	520	312	832	552	367	919	560	392	952
Lampung	2 321	1 151	3 472	2 493	1 334	3 828	2 455	1 370	3 824
Kep. Bangka Belitung	411	186	598	424	206	630	420	203	624
Kepulauan Riau	552	254	806	570	281	851	570	275	845
DKI Jakarta	2 929	1 739	4 668	2 992	1 783	4 775	2 919	1 760	4 679
Jawa Barat	12 635	6 097	18 732	13 112	6 369	19 481	12 975	6 468	19 444
Jawa Tengah	9 596	6 874	16 470	9 863	6 993	16 856	9 810	6 941	16 751
DI Yogyakarta	1 033	853	1 886	1 077	897	1 975	1 046	943	1 989
Jawa Timur	11 559	7 995	19 554	11 748	7 947	19 696	11 756	8 130	19 885
Banten	3 121	1 567	4 688	3 239	1 753	4 992	3 188	1 750	4 938
Bali	1 242	1 000	2 242	1 272	1 062	2 334	1 277	1 100	2 377
Nusa Tenggara Barat	1 172	860	2 032	1 235	876	2 112	1 266	945	2 211
Nusa Tenggara Timur	1 210	895	2 105	1 253	987	2 240	1 273	1 063	2 336
Kalimantan Barat	1 325	847	2 172	1 399	944	2 343	1 386	923	2 309
Kalimantan Tengah	741	383	1 124	768	438	1 206	771	443	1 214
Kalimantan Selatan	1 134	697	1 831	1 199	744	1 943	1 184	753	1 936
Kalimantan Timur	1 139	465	1 604	1 163	559	1 722	1 176	577	1 753
Sulawesi Utara	678	288	965	727	355	1 082	730	345	1 075
Sulawesi Tengah	819	420	1 239	838	509	1 346	848	538	1 386
Sulawesi Selatan	2 150	1 227	3 377	2 240	1 230	3 470	2 215	1 249	3 465
Sulawesi Tenggara	619	378	997	653	434	1 087	660	452	1 112
Gorontalo	304	155	459	315	193	508	317	191	508
Sulawesi Barat	337	209	545	349	241	590	352	240	591
Maluku	380	222	602	411	270	682	418	262	680
Maluku Utara	300	155	455	297	161	458	299	167	465
Papua Barat	232	128	360	238	134	372	249	143	393
Papua	923	637	1 560	923	674	1 597	943	687	1 630
Indonesia	70 335	42 426	112 761	72 732	44 935	117 667	72 540	45 630	118 170

Lampiran 7. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	72,90	39,41	55,94	77,13	42,30	59,50	77,58	44,66	60,91
Sumatera Utara	80,75	51,79	66,06	81,01	56,08	68,37	81,09	56,65	68,69
Sumatera Barat	73,30	44,25	58,50	81,02	52,93	66,71	80,50	52,26	66,12
Riau	79,15	39,63	59,96	81,52	46,39	64,46	81,86	44,13	63,55
Jambi	79,40	39,05	59,70	83,07	46,23	65,08	82,65	46,19	64,84
Sumatera Selatan	78,33	48,32	63,52	81,01	52,21	66,80	82,56	55,48	69,20
Bengkulu	79,07	49,33	64,48	83,61	57,72	70,90	84,49	61,43	73,17
Lampung	79,64	41,65	61,15	85,29	48,14	67,21	83,72	49,28	66,96
Kep. Bangka Belitung	83,07	41,07	62,99	85,10	45,18	66,02	84,02	44,34	65,05
Kepulauan Riau	83,36	40,13	62,21	85,45	43,96	65,16	84,78	42,83	64,26
DKI Jakarta	77,52	46,28	61,94	78,97	47,31	63,18	76,85	46,57	61,75
Jawa Barat	76,16	37,56	57,07	78,74	39,08	59,13	77,63	39,54	58,79
Jawa Tengah	78,66	54,20	66,19	80,69	55,03	67,61	80,10	54,52	67,06
DI Yogyakarta	75,15	59,29	67,05	78,09	62,22	69,98	75,62	65,18	70,28
Jawa Timur	80,93	53,30	66,78	82,13	52,90	67,15	82,04	54,03	67,69
Banten	75,16	39,16	57,49	77,58	43,56	60,89	75,94	43,26	59,91
Bali	81,53	65,60	73,56	83,25	69,44	76,35	83,31	71,75	77,53
Nusa Tenggara Barat	75,51	49,78	61,95	79,30	50,55	64,15	81,02	54,33	66,96
Nusa Tenggara Timur	77,64	54,77	65,94	80,04	60,15	69,86	81,03	64,52	72,58
Kalimantan Barat	79,98	53,04	66,76	84,10	58,86	71,71	82,97	57,33	70,38
Kalimantan Tengah	83,38	47,68	66,44	85,83	54,33	70,89	85,67	54,64	70,95
Kalimantan Selatan	82,12	51,21	66,78	86,41	54,47	70,56	84,96	54,84	70,01
Kalimantan Timur	78,27	36,07	58,45	79,42	43,08	62,36	79,80	44,20	63,08
Sulawesi Utara	76,36	33,60	55,37	81,65	41,42	61,90	81,80	40,11	61,33
Sulawesi Tengah	81,37	43,49	62,81	82,85	52,43	67,95	83,55	55,26	69,70
Sulawesi Selatan	76,21	39,85	57,24	79,19	39,87	58,68	78,11	40,38	58,43
Sulawesi Tenggara	78,83	47,43	63,02	82,67	54,18	68,32	83,12	56,16	69,54
Gorontalo	78,39	39,66	58,91	81,06	48,87	64,85	81,32	48,16	64,63
Sulawesi Barat	81,25	49,52	65,26	83,75	57,02	70,28	83,98	56,32	70,04
Maluku	70,44	41,17	55,79	75,92	49,85	62,87	76,84	48,07	62,44
Maluku Utara	80,05	43,00	61,90	78,82	44,50	62,01	78,82	45,85	62,67
Papua Barat	77,18	48,44	63,75	78,08	50,53	65,24	81,36	53,61	68,42
Papua	83,48	65,84	75,25	82,91	69,21	76,51	84,36	70,16	77,73
Indonesia	78,35	47,04	62,66	80,74	49,65	65,16	80,26	50,26	65,23

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013–2014

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	34,43	34,15	32,51	5,12	4,08	3,91	38,18	36,70	37,27
Sumatera Utara	36,09	30,77	30,51	3,49	3,66	3,26	31,63	35,49	36,73
Sumatera Barat	30,87	29,90	30,60	4,66	4,75	5,20	40,76	38,99	40,12
Riau	40,67	41,67	41,84	4,94	5,05	5,20	33,57	33,91	32,61
Jambi	36,58	35,03	35,38	4,45	4,48	4,91	38,75	37,19	37,86
Sumatera Selatan	32,93	33,30	33,59	2,73	2,25	2,34	37,72	37,17	36,37
Bengkulu	29,69	25,42	26,21	3,20	2,97	3,11	40,74	40,09	39,78
Lampung	25,48	26,23	25,18	3,50	3,45	3,54	39,72	37,14	38,29
Kep. Bangka Belitung	45,92	41,95	40,94	7,12	8,81	7,44	31,04	34,63	35,46
Kepulauan Riau	66,98	63,37	60,46	4,32	1,79	2,23	21,56	25,99	28,31
DKI Jakarta	66,35	67,90	67,85	3,85	3,64	3,80	20,95	21,32	20,41
Jawa Barat	42,81	43,16	43,86	3,41	3,53	3,30	30,42	29,43	29,20
Jawa Tengah	31,30	33,15	34,25	3,28	3,16	3,69	36,45	34,61	34,29
DI Yogyakarta	39,46	39,94	41,81	4,57	3,98	4,10	32,75	32,72	32,11
Jawa Timur	30,08	30,73	30,74	3,26	3,70	3,54	34,36	34,17	34,20
Banten	56,24	55,02	56,45	3,24	4,17	4,42	25,03	25,73	24,57
Bali	43,91	39,10	38,27	3,74	3,76	3,64	29,32	31,26	33,31
Nusa Tenggara Barat	21,64	22,26	22,10	2,62	2,88	2,59	39,78	40,75	39,46
Nusa Tenggara Timur	19,03	18,28	17,33	1,54	1,48	1,33	45,95	42,30	41,75
Kalimantan Barat	31,07	31,25	30,93	2,63	3,08	3,50	37,33	36,97	37,89
Kalimantan Tengah	37,37	37,66	38,66	3,26	2,56	2,22	38,33	37,08	37,47
Kalimantan Selatan	32,87	34,12	33,55	3,38	2,29	3,02	38,70	40,00	41,66
Kalimantan Timur	52,11	52,62	54,32	4,03	3,77	3,14	29,80	28,78	27,56
Sulawesi Utara	39,65	35,88	35,52	3,62	4,76	4,01	35,22	38,03	36,92
Sulawesi Tengah	28,50	30,02	29,59	3,86	3,15	3,35	41,20	38,80	38,27
Sulawesi Selatan	33,31	33,53	32,61	4,13	3,99	4,37	38,30	40,40	41,23
Sulawesi Tenggara	29,67	29,38	28,11	2,89	3,54	3,86	41,12	40,19	40,83
Gorontalo	32,13	35,36	34,55	3,38	3,93	2,99	42,54	38,98	40,85
Sulawesi Barat	24,91	23,49	27,75	1,74	2,35	2,66	45,37	43,70	39,06
Maluku	30,84	28,96	29,08	2,14	1,72	1,87	42,41	40,75	44,97
Maluku Utara	26,47	29,14	32,02	2,89	2,39	1,95	41,42	42,96	43,55
Papua Barat	35,66	37,20	36,61	2,00	1,10	1,63	38,79	35,15	34,95
Papua	17,21	16,97	16,69	1,26	2,05	1,28	43,29	43,01	41,74
Indonesia	36,47	36,51	36,68	3,43	3,49	3,51	34,19	33,88	33,90

Lampiran 8. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2013–2014
(lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	6,00	7,16	7,29	16,27	17,91	19,03	60,45	61,77	63,59
Sumatera Utara	7,60	7,26	6,50	21,19	22,82	23,00	60,42	65,57	66,23
Sumatera Barat	9,64	10,63	8,94	14,07	15,73	15,14	64,47	65,35	64,20
Riau	6,40	5,89	5,72	14,42	13,49	14,62	54,39	53,28	52,96
Jambi	6,66	6,12	5,11	13,56	17,17	16,75	58,97	60,49	59,72
Sumatera Selatan	5,06	4,81	5,45	21,55	22,46	22,26	64,34	64,45	64,08
Bengkulu	6,13	7,69	6,48	20,24	23,82	24,42	67,11	71,60	70,67
Lampung	11,00	10,93	11,19	20,31	22,26	21,79	71,03	70,32	71,28
Kep. Bangka Belitung	4,84	3,99	4,30	11,07	10,62	11,85	46,95	49,24	51,61
Kepulauan Riau	3,01	2,68	3,56	4,13	6,17	5,44	28,70	34,84	37,31
DKI Jakarta	2,50	3,18	2,91	6,36	3,96	5,02	29,80	28,46	28,35
Jawa Barat	14,89	14,69	14,78	8,48	9,20	8,87	53,79	53,32	52,85
Jawa Tengah	12,24	14,95	13,69	16,73	14,14	14,09	65,42	63,69	62,06
DI Yogyakarta	7,12	6,77	5,13	16,10	16,59	16,85	55,97	56,07	54,09
Jawa Timur	12,53	13,12	12,71	19,76	18,29	18,80	66,66	65,58	65,71
Banten	9,89	8,64	6,38	5,60	6,44	8,17	40,52	40,82	39,13
Bali	9,24	9,77	8,67	13,79	16,11	16,10	52,34	57,15	58,09
Nusa Tenggara Barat	19,14	15,46	12,91	16,81	18,66	22,94	75,74	74,87	75,31
Nusa Tenggara Timur	3,13	4,54	5,17	30,35	33,40	34,42	79,43	80,24	81,35
Kalimantan Barat	4,28	4,56	4,46	24,69	24,15	23,21	66,30	65,67	65,56
Kalimantan Tengah	3,58	5,01	3,86	17,46	17,69	17,80	59,37	59,78	59,13
Kalimantan Selatan	7,28	6,06	5,27	17,76	17,54	16,50	63,74	63,60	63,43
Kalimantan Timur	4,67	3,93	2,71	9,39	10,90	12,28	43,86	43,61	42,54
Sulawesi Utara	12,48	11,09	12,18	9,03	10,23	11,37	56,72	59,36	60,47
Sulawesi Tengah	7,08	7,91	7,90	19,37	20,12	20,88	67,64	66,83	67,05
Sulawesi Selatan	5,85	4,63	3,84	18,42	17,45	17,96	62,56	62,48	63,02
Sulawesi Tenggara	4,38	4,25	3,00	21,94	22,63	24,19	67,44	67,08	68,02
Gorontalo	9,30	9,44	9,68	12,66	12,29	11,92	64,49	60,71	62,46
Sulawesi Barat	5,02	4,40	5,77	22,95	26,06	24,76	73,35	74,15	69,59
Maluku	3,21	3,25	1,73	21,41	25,33	22,35	67,03	69,33	69,05
Maluku Utara	5,21	4,04	5,10	24,01	21,47	17,39	70,64	68,47	66,03
Papua Barat	2,06	3,40	2,17	21,49	23,15	24,64	62,34	61,70	61,77
Papua	1,50	1,95	2,33	36,74	36,02	37,96	81,53	80,98	82,03
Indonesia	9,98	10,28	9,72	15,93	15,84	16,19	60,10	60,00	59,81

Keterangan: *) Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 9. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2013–2014

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	46,68	10,85	42,46	46,89	13,35	39,76	47,15	13,39	39,46
Sumatera Utara	43,69	14,57	41,74	49,38	11,90	38,73	48,05	11,23	40,72
Sumatera Barat	39,68	13,30	47,02	41,66	14,23	44,11	41,68	14,24	44,08
Riau	44,63	13,90	41,48	41,76	13,09	45,14	42,41	13,08	44,50
Jambi	52,66	10,09	37,25	49,47	8,26	42,27	49,35	8,09	42,56
Sumatera Selatan	54,86	10,37	34,76	52,55	11,81	35,63	52,26	11,93	35,80
Bengkulu	52,46	9,04	38,50	58,13	8,89	32,98	58,30	7,71	33,99
Lampung	51,69	13,15	35,17	50,51	13,61	35,88	48,51	12,98	38,51
Kep. Bangka Belitung	28,39	32,48	39,12	26,37	31,47	42,15	28,54	30,73	40,73
Kepulauan Riau	10,46	37,21	52,33	13,41	37,16	49,43	13,96	31,38	54,65
DKI Jakarta	0,33	18,66	81,00	1,87	17,30	80,84	2,17	19,48	78,35
Jawa Barat	20,31	28,96	50,73	19,76	30,32	49,92	19,80	29,68	50,52
Jawa Tengah	31,41	25,26	43,33	30,65	29,44	39,91	30,99	28,58	40,44
DI Yogyakarta	28,18	19,66	52,15	24,51	21,26	54,23	25,42	20,04	54,54
Jawa Timur	37,90	20,34	41,76	38,42	21,74	39,84	36,86	21,48	41,65
Banten	15,51	31,94	52,56	14,71	29,11	56,17	14,42	28,31	57,27
Bali	24,43	24,02	51,55	23,48	24,75	51,78	24,82	24,66	50,52
Nusa Tenggara Barat	45,29	15,14	39,57	40,86	16,74	42,39	45,48	13,07	41,46
Nusa Tenggara Timur	61,04	12,08	26,88	62,58	11,26	26,17	65,04	9,81	25,15
Kalimantan Barat	57,85	12,87	29,28	57,29	12,60	30,11	57,19	12,28	30,54
Kalimantan Tengah	53,07	14,40	32,53	53,12	13,45	33,43	51,59	13,99	34,42
Kalimantan Selatan	40,55	17,26	42,19	36,30	23,35	40,35	36,84	22,70	40,46
Kalimantan Timur	26,89	22,82	50,29	26,69	22,39	50,92	24,27	21,38	54,36
Sulawesi Utara	34,50	15,87	49,63	33,87	16,98	49,15	31,87	17,63	50,50
Sulawesi Tengah	49,75	12,35	37,89	45,69	15,33	38,98	46,35	14,12	39,52
Sulawesi Selatan	43,63	12,65	43,71	40,48	14,46	45,06	40,65	12,53	46,82
Sulawesi Tenggara	41,82	14,43	43,75	41,17	13,38	45,45	41,90	13,56	44,54
Gorontalo	36,92	16,60	46,49	32,40	14,05	53,55	33,34	15,53	51,13
Sulawesi Barat	57,59	10,03	32,39	58,98	11,29	29,73	59,95	9,92	30,13
Maluku	48,26	10,02	41,72	52,29	10,76	36,95	50,55	10,44	39,01
Maluku Utara	54,82	9,14	36,03	52,14	9,80	38,07	47,83	11,99	40,18
Papua Barat	49,26	10,12	40,62	48,60	12,43	38,97	48,83	12,04	39,13
Papua	73,14	5,08	21,78	73,37	5,17	21,46	73,43	3,84	22,72
Indonesia	34,78	20,39	44,83	34,63	21,36	44,01	34,56	20,76	44,68

Lampiran 10. Indikator Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2013–2014

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	538	573	587	29,17	29,09	28,95	53,67	53,30	53,26
Sumatera Utara	1 246	1 673	1 503	20,50	26,50	23,62	54,52	57,27	58,28
Sumatera Barat	649	643	570	31,47	27,28	24,33	49,70	55,96	58,67
Riau	705	749	714	28,44	27,92	26,83	46,41	51,95	49,12
Jambi	573	576	526	41,03	37,65	34,37	38,08	45,77	45,20
Sumatera Selatan	1 327	1 150	1 092	37,65	30,90	28,24	46,92	52,10	54,47
Bengkulu	279	248	251	33,55	26,97	26,37	48,38	57,36	57,28
Lampung	1 296	1 230	1 114	37,32	32,14	29,13	41,11	48,69	51,26
Kep. Bangka Belitung	174	140	136	29,05	22,16	21,82	41,81	53,19	57,29
Kepulauan Riau	105	125	111	12,99	14,71	13,14	54,00	51,74	51,33
DKI Jakarta	354	465	451	7,58	9,74	9,64	56,47	55,06	58,36
Jawa Barat	2 935	3 099	3 037	15,67	15,91	15,62	50,25	57,33	58,60
Jawa Tengah	3 721	3 418	3 571	22,59	20,28	21,32	54,21	60,71	58,04
DI Yogyakarta	600	446	472	31,80	22,58	23,75	56,02	63,14	60,87
Jawa Timur	4 526	4 804	4 768	23,14	24,39	23,98	55,22	59,87	59,62
Banten	531	668	633	11,33	13,38	12,83	54,42	58,22	60,49
Bali	540	555	483	24,08	23,79	20,30	56,06	58,50	60,93
Nusa Tenggara Barat	447	420	482	21,98	19,89	21,79	51,53	54,60	60,06
Nusa Tenggara Timur	861	863	841	40,90	38,51	36,01	56,07	58,52	60,26
Kalimantan Barat	724	780	704	33,33	33,28	30,48	54,09	57,96	55,22
Kalimantan Tengah	356	327	297	31,69	27,08	24,45	49,53	55,11	57,62
Kalimantan Selatan	618	601	540	33,76	30,95	27,89	50,84	55,08	57,47
Kalimantan Timur	239	266	298	14,92	15,46	17,01	47,59	60,89	59,33
Sulawesi Utara	205	223	213	21,20	20,57	19,80	42,55	53,14	48,96
Sulawesi Tengah	427	348	368	34,46	25,85	26,54	44,27	61,64	61,34
Sulawesi Selatan	1 174	1 072	1 115	34,78	30,88	32,19	45,17	47,40	48,75
Sulawesi Tenggara	359	340	304	35,96	31,30	27,31	49,66	58,03	61,04
Gorontalo	121	103	103	26,31	20,26	20,18	49,33	56,30	57,92
Sulawesi Barat	276	257	240	50,51	43,48	40,53	43,22	55,07	53,31
Maluku	146	179	164	24,32	26,20	24,11	57,27	57,30	56,21
Maluku Utara	139	132	119	30,45	28,90	25,57	50,10	49,91	62,71
Papua Barat	97	108	101	26,88	29,17	25,72	53,39	54,77	60,23
Papua	450	463	493	28,88	29,00	30,24	51,49	53,85	54,48
Indonesia	26 736	27 043	26 401	23,71	22,98	22,34	51,18	56,61	57,06

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013–2014

Provinsi	0 jam*			1–14 jam			15–24 jam		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	5,64	1,83	2,00	10,35	7,74	9,93	19,57	16,71	15,92
Sumatera Utara	3,19	2,01	2,23	5,41	5,84	6,10	11,81	15,04	13,10
Sumatera Barat	10,82	2,67	3,15	11,14	9,27	7,02	17,96	13,51	13,87
Riau	4,48	1,77	1,24	8,94	8,44	7,02	14,54	12,53	12,94
Jambi	11,69	1,79	2,43	15,18	6,92	6,11	19,40	20,00	16,70
Sumatera Selatan	7,01	2,11	2,98	9,90	5,31	6,28	20,82	15,26	14,55
Bengkulu	8,49	3,99	2,18	10,88	7,57	7,15	16,60	13,15	11,03
Lampung	8,80	1,60	1,45	13,20	6,79	7,13	18,48	16,88	16,00
Kep. Bangka Belitung	7,87	4,25	2,53	8,27	3,91	3,38	16,31	10,33	10,85
Kepulauan Riau	3,70	1,85	2,30	4,21	3,97	2,59	5,89	6,10	4,96
DKI Jakarta	4,34	0,96	1,34	2,66	2,50	2,61	3,81	6,04	3,35
Jawa Barat	7,06	1,59	1,97	5,49	4,19	4,43	11,14	9,91	9,59
Jawa Tengah	9,89	2,07	3,29	8,39	5,38	6,34	12,93	9,94	10,56
DI Yogyakarta	7,18	1,56	2,01	13,32	6,95	7,36	13,46	8,51	10,24
Jawa Timur	4,72	1,48	1,43	7,81	6,25	7,25	12,89	12,25	11,88
Banten	5,80	1,32	1,37	4,17	3,56	3,06	7,38	8,25	7,14
Bali	4,43	1,10	2,28	5,74	5,20	4,30	9,49	9,09	8,17
Nusa Tenggara Barat	5,06	3,07	2,50	11,48	10,53	11,12	18,20	13,42	13,53
Nusa Tenggara Timur	3,29	2,55	2,58	11,52	8,74	9,51	19,04	17,16	18,35
Kalimantan Barat	4,82	1,04	1,78	7,96	5,00	3,94	20,84	22,76	19,04
Kalimantan Tengah	4,44	1,39	1,34	7,85	8,31	5,90	16,46	13,78	13,11
Kalimantan Selatan	5,59	3,43	2,47	9,22	7,05	5,55	16,44	16,85	13,70
Kalimantan Timur	2,66	2,02	1,72	3,01	3,15	3,92	7,97	7,27	7,54
Sulawesi Utara	3,31	2,91	2,57	5,19	5,36	5,65	12,70	11,34	11,30
Sulawesi Tengah	9,07	2,93	3,57	11,74	8,63	7,58	18,61	12,48	14,50
Sulawesi Selatan	5,04	3,36	3,47	11,81	10,73	9,74	17,81	15,48	15,62
Sulawesi Tenggara	8,51	3,00	2,95	14,27	8,98	9,39	18,81	16,56	14,19
Gorontalo	6,11	3,86	3,49	6,93	5,12	7,42	13,02	10,72	9,18
Sulawesi Barat	10,62	4,04	4,28	23,95	19,26	15,38	25,74	19,29	19,41
Maluku	2,98	2,97	4,96	7,70	7,06	7,42	14,24	14,77	14,62
Maluku Utara	5,04	1,87	3,43	8,50	7,99	6,82	16,41	17,59	14,98
Papua Barat	3,73	1,86	2,10	5,12	5,27	5,26	14,16	15,43	11,71
Papua	0,78	1,02	0,68	5,75	6,10	5,08	14,48	16,70	18,03
Indonesia	6,30	1,89	2,19	7,85	5,93	6,16	13,38	12,15	11,67

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013–2014
(lanjutan)

Provinsi	25–34 jam			35–39 jam			40–48 jam		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	17,65	19,12	17,75	11,31	12,18	13,14	18,76	23,05	21,78
Sumatera Utara	11,81	15,43	14,24	14,23	12,95	13,77	33,06	26,89	27,19
Sumatera Barat	14,36	15,58	12,71	8,42	10,71	11,76	18,34	24,22	26,27
Riau	14,19	14,10	14,79	9,51	10,22	9,96	23,90	26,26	26,95
Jambi	15,42	21,15	22,29	9,53	12,66	14,32	15,16	20,22	20,35
Sumatera Selatan	16,63	19,37	18,05	10,16	11,89	11,60	19,22	22,05	22,67
Bengkulu	15,45	15,62	15,94	8,99	12,62	11,58	20,01	26,97	28,33
Lampung	15,17	16,45	14,95	7,43	12,59	10,82	18,86	23,14	24,85
Kep. Bangka Belitung	13,20	14,45	13,88	8,28	10,33	9,90	27,33	34,75	35,90
Kepulauan Riau	5,88	8,27	9,51	5,67	8,03	9,24	41,49	38,63	39,61
DKI Jakarta	4,23	5,08	5,09	6,50	4,11	4,39	47,11	52,13	51,28
Jawa Barat	9,52	10,94	11,29	8,87	9,19	8,16	32,15	37,06	35,86
Jawa Tengah	10,29	11,78	12,05	11,94	9,41	9,17	25,40	32,14	31,64
DI Yogyakarta	13,04	11,14	11,30	8,67	9,14	10,03	24,16	34,21	31,96
Jawa Timur	12,39	13,79	14,22	11,71	10,32	10,12	27,51	29,14	27,90
Banten	8,50	8,49	8,83	7,11	6,34	6,05	43,17	49,31	46,91
Bali	11,87	12,35	10,49	8,40	9,42	9,49	28,43	28,78	27,98
Nusa Tenggara Barat	17,09	14,35	14,97	9,99	10,68	11,04	18,62	21,56	20,54
Nusa Tenggara Timur	20,75	21,22	20,68	12,55	13,23	14,76	21,26	23,41	22,64
Kalimantan Barat	15,02	15,78	15,49	9,97	10,83	10,99	24,06	25,78	29,29
Kalimantan Tengah	16,36	16,25	15,30	10,12	9,66	10,83	23,10	26,17	28,91
Kalimantan Selatan	16,53	16,75	17,84	10,94	11,07	13,73	21,48	26,35	24,46
Kalimantan Timur	9,69	10,52	10,90	9,70	12,62	11,14	26,77	28,74	27,31
Sulawesi Utara	12,83	12,45	11,26	9,35	11,57	10,82	33,44	36,54	36,19
Sulawesi Tengah	16,12	14,00	14,60	9,47	12,14	13,15	19,93	25,71	23,63
Sulawesi Selatan	14,61	15,06	16,18	9,23	11,15	10,11	22,80	21,55	22,45
Sulawesi Tenggara	16,08	15,93	15,22	7,56	11,65	12,38	16,55	19,88	20,80
Gorontalo	13,20	11,77	13,34	10,21	13,14	9,11	21,57	22,46	19,81
Sulawesi Barat	14,45	18,71	19,80	6,48	10,28	11,34	10,27	16,55	16,26
Maluku	15,73	16,78	15,90	14,40	12,98	13,00	20,94	27,25	26,04
Maluku Utara	17,55	17,45	17,08	13,01	14,07	14,63	22,43	23,88	24,81
Papua Barat	19,43	17,51	19,05	12,29	12,05	14,55	22,52	26,37	25,43
Papua	26,14	23,04	26,27	17,15	16,78	17,88	23,67	22,03	18,95
Indonesia	12,24	13,39	13,45	10,28	10,19	10,09	27,67	31,00	30,38

Lampiran 11. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2013–2014
(lanjutan)

Provinsi (1)	49–59 jam			60 jam keatas		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	9,42	11,72	11,15	7,31	7,64	8,34
Sumatera Utara	11,63	10,75	11,40	8,86	11,07	11,96
Sumatera Barat	10,47	14,60	14,25	8,50	9,43	10,98
Riau	12,62	14,50	15,40	11,81	12,18	11,70
Jambi	8,05	9,42	10,05	5,56	7,84	7,74
Sumatera Selatan	9,04	13,22	13,77	7,21	10,79	10,11
Bengkulu	11,09	13,97	16,10	8,49	6,12	7,68
Lampung	12,52	15,06	16,66	5,53	7,50	8,14
Kep. Bangka Belitung	10,87	15,82	16,51	7,88	6,16	7,06
Kepulauan Riau	17,42	17,29	19,33	15,75	15,85	12,47
DKI Jakarta	14,11	12,34	14,72	17,24	16,84	17,21
Jawa Barat	14,05	13,97	15,34	11,73	13,15	13,36
Jawa Tengah	13,33	18,71	16,76	7,83	10,57	10,20
DI Yogyakarta	12,18	19,44	18,27	7,99	9,06	8,82
Jawa Timur	14,33	16,17	16,41	8,63	10,58	10,79
Banten	12,49	12,58	15,41	11,39	10,14	11,23
Bali	17,58	17,55	20,68	14,06	16,50	16,61
Nusa Tenggara Barat	12,89	17,22	15,27	6,67	9,17	11,03
Nusa Tenggara Timur	6,05	8,06	6,28	5,54	5,62	5,20
Kalimantan Barat	10,36	11,20	11,22	6,96	7,62	8,25
Kalimantan Tengah	11,73	13,45	13,32	9,95	11,00	11,30
Kalimantan Selatan	11,22	10,77	13,95	8,58	7,74	8,29
Kalimantan Timur	18,77	17,27	17,36	21,42	18,41	20,11
Sulawesi Utara	12,22	11,04	13,50	10,96	8,79	8,72
Sulawesi Tengah	8,18	16,02	14,11	6,88	8,09	8,87
Sulawesi Selatan	11,08	13,97	12,41	7,60	8,71	10,02
Sulawesi Tenggara	10,98	15,18	15,95	7,26	8,82	9,11
Gorontalo	16,12	16,26	19,48	12,84	16,67	18,18
Sulawesi Barat	4,80	8,96	10,03	3,70	2,89	3,51
Maluku	12,04	9,62	9,79	11,96	8,58	8,26
Maluku Utara	9,72	10,55	11,33	7,32	6,60	6,93
Papua Barat	10,55	12,00	12,35	12,20	9,51	9,56
Papua	6,21	6,59	5,93	5,83	7,74	7,18
Indonesia	12,75	14,59	14,93	9,53	10,87	11,13

Lampiran 12. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal dan Informal, 2013–2014

Provinsi	Formal			Informal		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	43,30	42,08	40,72	56,70	57,92	59,28
Sumatera Utara	45,50	39,23	38,83	54,50	60,77	61,17
Sumatera Barat	43,13	41,39	41,99	56,87	58,61	58,01
Riau	50,53	51,47	51,29	49,47	48,53	48,71
Jambi	45,27	44,20	44,84	54,73	55,80	55,16
Sumatera Selatan	39,48	40,12	39,69	60,52	59,88	60,31
Bengkulu	38,04	33,83	35,05	61,96	66,17	64,95
Lampung	34,78	36,07	35,90	65,22	63,93	64,10
Kep. Bangka Belitung	58,49	56,34	53,64	41,51	43,66	46,36
Kepulauan Riau	73,72	68,91	67,33	26,28	31,09	32,67
DKI Jakarta	77,16	76,68	76,31	22,84	23,32	23,69
Jawa Barat	54,47	53,28	54,02	45,53	46,72	45,98
Jawa Tengah	44,25	43,68	44,89	55,75	56,32	55,11
DI Yogyakarta	52,29	53,61	55,09	47,71	46,39	44,91
Jawa Timur	42,04	41,69	41,63	57,96	58,31	58,37
Banten	64,73	63,89	66,08	35,27	36,11	33,92
Bali	55,13	52,02	50,29	44,87	47,98	49,71
Nusa Tenggara Barat	31,58	32,85	30,93	68,42	67,15	69,07
Nusa Tenggara Timur	23,84	23,07	21,95	76,16	76,93	78,05
Kalimantan Barat	36,87	38,54	38,47	63,13	61,46	61,53
Kalimantan Tengah	44,86	45,06	46,67	55,14	54,94	53,33
Kalimantan Selatan	42,73	43,71	43,49	57,27	56,29	56,51
Kalimantan Timur	61,06	61,56	63,84	38,94	38,44	36,16
Sulawesi Utara	46,50	43,89	44,49	53,50	56,11	55,51
Sulawesi Tengah	37,87	39,55	40,17	62,13	60,45	59,83
Sulawesi Selatan	43,25	44,87	43,72	56,75	55,13	56,28
Sulawesi Tenggara	39,30	39,14	39,29	60,70	60,86	60,71
Gorontalo	41,14	45,62	44,34	58,86	54,38	55,66
Sulawesi Barat	32,45	30,38	35,14	67,55	69,62	64,86
Maluku	36,30	34,15	35,15	63,70	65,85	64,85
Maluku Utara	32,70	34,92	38,46	67,30	65,08	61,54
Papua Barat	42,55	43,02	41,09	57,45	56,98	58,91
Papua	21,05	21,12	19,90	78,95	78,88	80,10
Indonesia	46,97	46,23	46,41	53,03	53,77	53,59

Lampiran 13. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014
(persen)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	8,94	12,17	10,12	7,61	8,64	7,98	6,53	7,12	6,75
Sumatera Utara	5,62	7,69	6,45	5,27	7,15	6,06	4,95	7,30	5,95
Sumatera Barat	6,97	7,10	7,02	5,44	6,89	6,03	5,84	7,04	6,32
Riau	4,50	7,49	5,48	4,53	5,37	4,82	4,33	6,27	4,99
Jambi	4,03	6,27	4,76	2,56	2,69	2,61	2,08	3,27	2,50
Sumatera Selatan	5,17	4,28	4,84	4,10	3,79	3,98	4,22	3,25	3,84
Bengkulu	4,14	5,38	4,61	2,59	2,99	2,75	1,63	1,61	1,62
Lampung	4,98	7,10	5,69	3,78	6,87	4,88	4,53	6,05	5,08
Kep. Bangka Belitung	3,17	4,69	3,65	2,04	3,63	2,57	2,85	2,32	2,67
Kepulauan Riau	3,64	9,67	5,63	2,19	7,14	3,88	3,88	8,00	5,26
DKI Jakarta	8,09	9,51	8,63	7,87	9,80	8,60	9,63	10,17	9,84
Jawa Barat	8,73	10,04	9,16	8,14	9,96	8,75	8,51	8,97	8,66
Jawa Tengah	6,12	5,87	6,01	5,85	5,69	5,79	5,66	5,15	5,45
DI Yogyakarta	3,59	2,81	3,24	2,58	3,63	3,06	2,67	1,60	2,16
Jawa Timur	4,46	4,07	4,30	3,27	4,96	3,96	3,98	4,08	4,02
Banten	9,70	9,21	9,54	9,52	8,69	9,23	9,94	9,75	9,87
Bali	2,19	1,38	1,83	2,17	1,28	1,77	1,73	0,95	1,37
Nusa Tenggara Barat	5,89	4,48	5,30	4,80	3,98	4,46	5,52	5,00	5,30
Nusa Tenggara Timur	2,81	3,84	3,25	2,30	3,42	2,80	2,24	1,65	1,97
Kalimantan Barat	4,15	3,76	3,99	2,34	2,25	2,30	2,56	2,49	2,53
Kalimantan Tengah	2,75	3,50	3,00	1,73	3,87	2,52	2,45	3,15	2,71
Kalimantan Selatan	3,78	3,46	3,66	3,37	3,35	3,36	4,01	4,06	4,03
Kalimantan Timur	7,30	9,49	7,95	8,02	7,44	7,83	8,04	10,59	8,89
Sulawesi Utara	5,41	9,88	6,79	4,87	9,67	6,50	4,93	11,85	7,27
Sulawesi Tengah	3,90	4,75	4,19	3,20	2,71	3,01	2,94	2,90	2,92
Sulawesi Selatan	4,88	5,50	5,10	3,88	6,74	4,91	4,92	7,30	5,79
Sulawesi Tenggara	3,59	5,66	4,38	1,85	3,55	2,53	1,94	2,40	2,13
Gorontalo	3,54	5,33	4,15	2,43	4,37	3,17	1,81	3,47	2,44
Sulawesi Barat	2,38	2,30	2,35	1,34	1,63	1,46	1,22	2,15	1,60
Maluku	8,77	11,80	9,91	5,23	9,85	7,12	4,81	9,30	6,59
Maluku Utara	2,58	6,10	3,80	5,14	7,73	6,06	4,00	8,47	5,65
Papua Barat	4,17	4,83	4,40	4,49	4,53	4,51	3,36	4,28	3,70
Papua	2,99	3,39	3,15	3,54	2,88	3,27	3,49	3,48	3,48
Indonesia	6,02	6,40	6,17	5,34	6,21	5,67	5,62	5,84	5,70

Lampiran 14. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014 (persen)

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	6,77	4,37	4,70	16,05	13,71	10,09	10,13	10,11	7,47
Sumatera Utara	4,15	4,64	4,86	9,92	9,17	8,47	8,33	3,87	4,01
Sumatera Barat	4,58	5,20	4,45	11,86	7,46	10,57	7,91	6,74	5,66
Riau	3,37	2,71	2,39	9,36	6,97	8,33	6,48	8,97	8,32
Jambi	3,09	1,54	1,30	9,09	4,42	5,15	4,31	4,42	2,58
Sumatera Selatan	2,40	1,78	2,31	9,81	8,49	6,72	8,70	7,43	7,45
Bengkulu	2,95	1,37	0,75	7,89	5,31	2,43	5,55	4,50	4,84
Lampung	3,56	3,04	3,80	11,15	9,44	9,37	7,24	6,68	3,46
Kep. Bangka Belitung	2,30	1,33	1,44	7,16	5,88	5,27	3,66	1,63	4,96
Kepulauan Riau	4,68	3,13	3,90	7,16	4,84	8,19	3,05	4,27	3,12
DKI Jakarta	8,37	8,97	11,20	10,41	9,76	11,50	4,86	6,01	4,75
Jawa Barat	8,31	7,69	8,20	12,67	11,62	10,80	5,45	8,18	5,51
Jawa Tengah	4,78	5,16	4,82	11,04	8,47	7,59	4,37	4,57	5,75
DI Yogyakarta	1,33	1,15	0,85	5,83	4,07	3,29	4,09	6,31	3,42
Jawa Timur	2,95	2,84	3,12	8,88	7,59	7,57	3,49	3,50	2,22
Banten	8,71	11,06	12,30	12,46	9,11	9,01	5,45	1,81	1,85
Bali	0,87	0,46	0,21	3,02	2,92	3,24	2,78	5,00	1,86
Nusa Tenggara Barat	3,32	2,15	5,10	11,57	10,18	6,83	6,64	6,96	2,79
Nusa Tenggara Timur	1,78	1,37	1,11	7,74	9,55	4,91	7,83	3,37	5,03
Kalimantan Barat	2,57	1,40	1,38	9,00	5,00	6,67	4,66	4,59	3,22
Kalimantan Tengah	1,51	2,16	2,04	6,46	2,97	3,00	5,79	3,97	6,48
Kalimantan Selatan	2,77	2,79	3,21	7,21	6,08	7,76	2,57	1,93	2,29
Kalimantan Timur	6,80	6,38	8,43	10,40	9,82	10,00	5,56	7,80	7,39
Sulawesi Utara	4,45	4,85	5,38	11,07	8,53	10,26	5,73	9,41	8,31
Sulawesi Tengah	3,01	1,16	1,37	7,14	7,08	6,63	4,70	4,75	3,87
Sulawesi Selatan	3,00	3,50	4,11	9,37	7,16	8,94	6,48	7,00	7,24
Sulawesi Tenggara	2,33	1,05	0,68	8,46	4,45	3,60	5,43	5,31	5,36
Gorontalo	1,90	1,40	1,53	9,79	7,39	5,06	9,25	7,31	4,04
Sulawesi Barat	1,59	0,47	0,52	4,85	2,70	2,91	2,65	6,83	6,97
Maluku	4,04	3,68	3,26	17,57	12,18	10,78	14,82	13,46	13,80
Maluku Utara	2,14	2,62	2,22	6,22	11,14	9,65	6,99	12,10	12,26
Papua Barat	2,13	1,57	1,78	7,95	11,02	6,45	6,22	4,35	6,96
Papua	1,41	1,90	1,72	8,37	6,88	9,17	8,58	9,07	8,55
Indonesia	4,63	4,47	4,75	10,26	8,63	8,42	5,55	5,72	4,72

Lampiran 15. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	37,11	30,90	38,97	49,59	53,16	47,44	13,30	15,94	13,58
Sumatera Utara	37,22	44,90	47,84	51,88	49,56	45,99	10,91	5,54	6,17
Sumatera Barat	39,23	51,01	41,33	47,41	35,15	46,71	13,36	13,84	11,97
Riau	36,64	31,36	26,91	51,09	47,68	53,81	12,27	20,96	19,28
Jambi	41,31	37,17	31,64	48,80	42,91	55,76	9,89	19,92	12,61
Sumatera Selatan	32,53	29,49	40,18	49,24	55,28	43,75	18,23	15,23	16,07
Bengkulu	39,13	31,28	29,19	47,57	52,80	39,80	13,29	15,91	31,01
Lampung	42,41	42,33	51,00	47,20	47,28	43,49	10,38	10,39	5,51
Kep. Bangka Belitung	41,51	34,05	36,22	49,72	61,09	49,83	8,77	4,87	13,95
Kepulauan Riau	34,18	41,27	36,86	59,06	41,32	53,83	6,75	17,41	9,31
DKI Jakarta	34,16	35,16	37,87	55,00	48,24	50,94	10,84	16,60	11,19
Jawa Barat	60,89	57,89	61,98	34,32	34,29	32,73	4,79	7,82	5,29
Jawa Tengah	58,24	65,27	64,45	36,95	29,55	28,63	4,81	5,18	6,92
DI Yogyakarta	21,27	17,78	18,55	60,60	47,78	55,28	18,13	34,44	26,17
Jawa Timur	48,66	49,63	53,40	45,77	42,81	41,56	5,57	7,56	5,03
Banten	52,74	66,51	69,12	41,07	30,91	28,37	6,18	2,57	2,51
Bali	25,56	14,83	8,64	52,92	50,46	76,24	21,52	34,71	15,11
Nusa Tenggara Barat	43,79	32,69	65,49	43,18	54,19	29,95	13,03	13,12	4,56
Nusa Tenggara Timur	41,24	37,73	43,64	40,94	53,90	38,13	17,82	8,37	18,23
Kalimantan Barat	46,99	45,03	40,08	45,07	39,83	50,43	7,94	15,13	9,49
Kalimantan Tengah	34,46	57,52	50,64	48,30	27,44	24,88	17,24	15,04	24,48
Kalimantan Selatan	53,42	59,44	56,95	40,37	35,43	38,09	6,20	5,12	4,96
Kalimantan Timur	44,23	41,06	45,17	47,23	46,35	43,23	8,54	12,59	11,60
Sulawesi Utara	36,01	43,06	42,17	53,87	40,87	45,37	10,12	16,06	12,46
Sulawesi Tengah	46,59	25,00	30,47	40,84	58,70	55,92	12,57	16,30	13,61
Sulawesi Selatan	35,60	43,40	42,84	46,28	37,12	39,51	18,11	19,48	17,65
Sulawesi Tenggara	31,79	24,82	18,62	51,87	46,27	46,55	16,33	28,91	34,83
Gorontalo	32,30	31,02	44,63	45,39	40,54	37,45	22,31	28,44	17,92
Sulawesi Barat	47,48	22,72	22,56	41,31	38,85	38,70	11,21	38,44	38,73
Maluku	21,90	31,69	30,10	57,50	45,07	42,87	20,60	23,24	27,04
Maluku Utara	34,63	26,37	23,18	43,84	46,68	44,81	21,53	26,95	32,01
Papua Barat	27,52	20,60	29,07	53,87	66,07	43,61	18,61	13,33	27,32
Papua	33,60	44,08	37,48	48,28	35,90	44,52	18,12	20,01	18,00
Indonesia	48,68	50,68	53,35	42,96	39,38	38,35	8,36	9,94	8,30

Lampiran 16. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	61,61	54,82	50,39	28,90	30,88	36,03	9,48	14,31	13,58
Sumatera Utara	58,89	54,20	57,64	34,06	37,80	34,86	7,05	8,00	7,50
Sumatera Barat	65,06	60,61	65,12	25,91	28,17	22,48	9,03	11,21	12,40
Riau	67,75	65,92	66,57	26,05	26,25	27,30	6,21	7,83	6,13
Jambi	69,18	64,14	56,48	25,02	24,50	33,15	5,79	11,36	10,37
Sumatera Selatan	68,98	70,90	67,90	25,90	22,21	25,44	5,12	6,89	6,66
Bengkulu	67,10	68,86	64,77	26,99	25,00	27,79	5,91	6,14	7,44
Lampung	71,23	69,01	70,27	24,21	26,93	24,13	4,56	4,06	5,59
Kep. Bangka Belitung	72,50	82,09	75,72	23,93	10,08	19,73	3,57	7,83	4,56
Kepulauan Riau	69,90	64,31	56,59	29,84	34,30	33,45	0,26	1,39	9,96
DKI Jakarta	40,84	51,83	37,68	43,30	33,17	50,45	15,85	15,00	11,87
Jawa Barat	83,95	81,25	79,31	12,28	13,26	13,82	3,76	5,48	6,87
Jawa Tengah	80,34	80,47	79,41	16,13	14,35	15,10	3,53	5,17	5,49
DI Yogyakarta	55,15	47,70	53,90	37,62	36,48	28,20	7,23	15,83	17,90
Jawa Timur	80,77	81,35	79,53	15,99	13,93	15,47	3,23	4,73	5,00
Banten	77,51	77,50	72,01	16,14	17,66	19,76	6,35	4,84	8,23
Bali	58,53	83,73	54,76	33,62	10,90	37,74	7,84	5,38	7,50
Nusa Tenggara Barat	78,61	78,81	70,32	16,31	14,99	20,69	5,08	6,19	8,99
Nusa Tenggara Timur	72,93	81,67	79,95	21,66	14,13	16,73	5,41	4,20	3,32
Kalimantan Barat	79,04	77,50	74,69	16,86	14,46	17,69	4,10	8,04	7,61
Kalimantan Tengah	71,46	60,00	64,63	23,41	34,01	26,61	5,13	5,99	8,76
Kalimantan Selatan	75,55	80,01	80,53	18,23	16,68	15,56	6,21	3,31	3,91
Kalimantan Timur	61,14	51,07	53,79	31,94	36,20	37,28	6,92	12,74	8,92
Sulawesi Utara	63,15	64,92	65,99	31,69	31,71	31,44	5,16	3,37	2,57
Sulawesi Tengah	69,40	71,96	69,73	22,17	20,48	19,17	8,43	7,56	11,10
Sulawesi Selatan	61,18	57,21	51,33	28,78	29,67	32,13	10,04	13,12	16,54
Sulawesi Tenggara	58,72	42,59	51,16	30,21	34,05	30,50	11,07	23,36	18,34
Gorontalo	82,36	81,49	76,67	15,80	16,30	18,91	1,84	2,21	4,41
Sulawesi Barat	68,21	75,43	68,52	24,85	19,51	27,99	6,94	5,06	3,49
Maluku	62,46	66,38	65,03	32,66	27,59	31,15	4,88	6,04	3,82
Maluku Utara	66,74	62,43	67,98	25,60	27,97	24,56	7,65	9,60	7,46
Papua Barat	63,07	68,95	67,82	22,90	22,13	24,60	14,02	8,91	7,58
Papua	89,99	89,27	88,43	8,49	9,20	10,07	1,52	1,53	1,50
Indonesia	75,08	73,37	72,31	19,81	19,86	20,58	5,11	6,77	7,11

Lampiran 17. Penduduk Umur 15 Tahun keatas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja
Menurut Provinsi, 2013–2014
(dalam ribu)

Provinsi	2013		2014
	Agustus	November	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 244	1 170	1 154
Sumatera Utara	2 704	2 514	2 498
Sumatera Barat	1 306	1 025	1 043
Riau	1 512	1 343	1 387
Jambi	873	780	791
Sumatera Selatan	1 845	1 695	1 567
Bengkulu	418	351	333
Lampung	1 996	1 671	1 682
Kep. Bangka Belitung	328	308	318
Kepulauan Riau	442	421	423
DKI Jakarta	2 428	2 333	2 388
Jawa Barat	12 204	11 600	11 786
Jawa Tengah	7 358	7 038	7 262
DI Yogyakarta	864	785	797
Jawa Timur	8 850	8 822	8 659
Banten	2 972	2 699	2 764
Bali	764	681	656
Nusa Tenggara Barat	1 134	1 081	967
Nusa Tenggara Timur	1 017	902	836
Kalimantan Barat	991	869	912
Kalimantan Tengah	533	464	463
Kalimantan Selatan	841	743	748
Kalimantan Timur	1 002	893	855
Sulawesi Utara	708	591	594
Sulawesi Tengah	679	593	561
Sulawesi Selatan	2 340	2 264	2 252
Sulawesi Tenggara	539	476	463
Gorontalo	300	258	265
Sulawesi Barat	277	241	243
Maluku	411	350	361
Maluku Utara	262	251	249
Papua Barat	188	181	166
Papua	462	436	408
Indonesia	59 795	55 830	55 853

Lampiran 18. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2013–2014
(persen)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19,95	55,13	37,76	16,52	53,70	35,34	17,00	51,92	34,68
Sumatera Utara	14,44	43,90	29,38	14,49	39,59	27,22	14,69	38,89	26,96
Sumatera Barat	21,21	52,37	37,08	14,32	43,15	29,00	14,51	43,78	29,42
Riau	17,12	57,17	36,56	14,61	50,98	32,27	14,43	52,92	33,12
Jambi	17,27	58,34	37,32	14,75	52,49	33,18	15,60	52,25	33,49
Sumatera Selatan	17,40	49,52	33,25	15,53	45,74	30,44	13,80	42,66	28,04
Bengkulu	17,51	47,87	32,41	14,16	40,50	27,09	14,11	37,56	25,62
Lampung	16,19	55,17	35,16	11,36	48,31	29,34	12,30	47,55	29,45
Kep. Bangka Belitung	14,21	56,91	34,62	13,13	53,11	32,25	13,52	54,60	33,16
Kepulauan Riau	13,49	55,57	34,08	12,64	52,66	32,21	11,80	53,45	32,17
DKI Jakarta	15,65	48,86	32,21	14,29	47,55	30,87	14,96	48,15	31,51
Jawa Barat	16,56	58,26	37,18	14,28	56,59	35,21	15,16	56,56	35,64
Jawa Tengah	16,21	42,42	29,57	14,29	41,65	28,23	15,09	42,52	29,07
DI Yogyakarta	22,05	38,99	30,71	19,84	35,44	27,81	22,30	33,76	28,16
Jawa Timur	15,29	44,44	30,22	15,10	44,34	30,08	14,56	43,68	29,48
Banten	16,77	56,87	36,45	14,25	52,29	32,92	15,67	52,06	33,53
Bali	16,65	33,48	25,07	14,90	29,65	22,28	15,22	27,57	21,39
Nusa Tenggara Barat	19,76	47,89	34,58	16,70	47,36	32,85	14,24	42,81	29,29
Nusa Tenggara Timur	20,11	43,05	31,85	18,07	37,72	28,13	17,12	34,40	25,96
Kalimantan Barat	16,57	44,88	30,47	13,88	39,79	26,60	14,85	41,21	27,79
Kalimantan Tengah	14,27	50,59	31,50	12,65	43,48	27,27	12,18	43,58	27,07
Kalimantan Selatan	14,65	46,96	30,69	10,58	43,65	26,99	11,49	42,84	27,05
Kalimantan Timur	15,57	60,14	36,50	13,66	53,45	32,35	13,23	50,57	30,77
Sulawesi Utara	19,27	62,72	40,59	14,17	54,15	33,80	13,96	54,50	33,86
Sulawesi Tengah	15,33	54,35	34,44	14,42	46,11	29,93	13,92	43,09	28,21
Sulawesi Selatan	19,88	57,82	39,68	17,61	57,24	38,29	17,85	56,44	37,98
Sulawesi Tenggara	18,24	49,72	34,09	15,77	43,83	29,90	15,23	42,46	28,95
Gorontalo	18,74	58,11	38,54	16,93	48,90	33,02	17,18	50,11	33,75
Sulawesi Barat	16,76	49,31	33,17	15,11	42,03	28,68	14,98	42,44	28,82
Maluku	22,79	53,32	38,07	19,89	44,71	32,31	19,28	47,01	33,16
Maluku Utara	17,84	54,21	35,65	16,91	51,77	33,98	17,89	49,91	33,57
Papua Barat	19,47	49,10	33,31	18,24	47,07	31,69	15,81	43,99	28,95
Papua	13,94	31,85	22,30	14,04	28,74	20,90	12,59	27,31	19,46
Indonesia	16,63	49,74	33,23	14,70	47,06	30,92	14,96	46,63	30,83

Lampiran 19. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2013–2014

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014	Ags 2013	Nov 2013	Feb 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	55,46	56,46	55,98	31,26	30,95	31,75	13,28	12,59	12,28
Sumatera Utara	57,79	58,57	58,55	33,76	32,76	32,30	8,45	8,67	9,14
Sumatera Barat	60,08	59,20	58,71	28,07	28,41	27,93	11,85	12,39	13,36
Riau	59,69	55,74	56,17	29,94	33,00	32,26	10,38	11,26	11,56
Jambi	63,57	62,98	60,69	25,52	25,29	27,09	10,92	11,73	12,21
Sumatera Selatan	65,57	65,95	66,73	24,29	25,90	24,99	10,14	8,16	8,28
Bengkulu	61,20	62,90	63,05	27,77	27,37	26,56	11,03	9,73	10,38
Lampung	67,75	67,95	68,30	24,09	24,45	23,59	8,15	7,60	8,11
Kep. Bangka Belitung	65,89	65,68	67,21	25,35	26,66	25,27	8,75	7,66	7,52
Kepulauan Riau	41,09	51,10	49,68	46,43	33,09	34,59	12,48	15,81	15,73
DKI Jakarta	35,20	33,71	33,27	45,57	42,52	43,58	19,23	23,76	23,14
Jawa Barat	67,15	65,82	65,43	24,80	25,82	26,25	8,05	8,36	8,32
Jawa Tengah	73,24	73,24	72,89	20,14	20,20	20,56	6,62	6,56	6,55
DI Yogyakarta	51,95	47,34	47,13	33,70	35,95	36,30	14,35	16,71	16,56
Jawa Timur	70,99	69,13	68,83	22,15	22,32	22,07	6,86	8,55	9,09
Banten	57,74	55,53	55,51	31,44	31,32	31,09	10,82	13,15	13,40
Bali	53,74	57,17	56,67	32,10	30,54	32,20	14,16	12,29	11,13
Nusa Tenggara Barat	69,83	67,86	68,10	19,77	23,73	23,24	10,40	8,41	8,66
Nusa Tenggara Timur	75,42	77,25	77,57	17,18	15,79	15,30	7,40	6,95	7,14
Kalimantan Barat	73,17	74,05	73,44	20,02	18,35	19,11	6,81	7,60	7,45
Kalimantan Tengah	68,60	67,17	67,30	22,45	23,28	22,48	8,95	9,56	10,22
Kalimantan Selatan	70,69	71,53	71,50	20,48	19,57	19,77	8,83	8,90	8,73
Kalimantan Timur	51,70	50,41	47,61	36,09	36,96	38,43	12,21	12,63	13,96
Sulawesi Utara	54,98	57,76	56,99	33,02	31,14	32,11	12,00	11,10	10,90
Sulawesi Tengah	64,81	64,68	65,07	23,98	24,98	24,65	11,21	10,34	10,27
Sulawesi Selatan	60,52	60,86	60,29	25,21	25,48	25,59	14,27	13,67	14,12
Sulawesi Tenggara	59,94	59,86	58,65	26,87	26,34	27,54	13,19	13,80	13,82
Gorontalo	70,73	70,28	71,12	19,25	17,38	18,05	10,02	12,34	10,83
Sulawesi Barat	70,03	70,82	69,91	20,03	20,97	21,21	9,94	8,20	8,88
Maluku	53,78	61,37	60,85	32,44	26,33	26,23	13,78	12,29	12,92
Maluku Utara	61,46	61,07	59,01	26,82	25,42	26,24	11,72	13,51	14,75
Papua Barat	56,99	59,16	60,47	29,84	27,03	25,01	13,17	13,81	14,51
Papua	75,14	75,76	75,76	18,20	17,03	16,91	6,66	7,21	7,33
Indonesia	64,89	64,26	63,99	25,82	25,87	25,98	9,29	9,86	10,03

Lampiran 20. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, 2013–2014 (rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 348 722	823 649	1 231 925	1 396 016	928 171	1 299 491	1 319 035	820 542	1 225 675
2	3 297 256	2 282 465	3 248 267	3 253 252	2 512 405	3 214 075	3 114 981	2 907 368	3 099 772
3	1 899 609	1 393 063	1 714 596	1 874 920	1 247 769	1 648 486	1 811 330	1 205 595	1 593 805
4	2 318 698	3 309 187	2 451 300	2 445 774	1 678 367	2 347 584	2 452 028	2 331 811	2 441 991
5	1 683 602	2 444 821	1 715 018	1 737 716	1 978 018	1 744 505	1 788 546	2 007 305	1 797 004
6	1 725 983	1 324 786	1 569 985	1 664 496	1 327 849	1 535 094	1 604 160	1 178 644	1 437 260
7	2 225 497	2 165 460	2 218 747	2 313 726	2 361 518	2 318 860	2 217 898	2 194 993	2 215 624
8	2 743 852	2 709 856	2 734 533	2 930 486	2 708 211	2 863 283	2 765 632	2 747 162	2 760 118
9	2 475 719	1 811 164	2 167 187	2 541 036	1 809 910	2 190 700	2 533 164	1 750 155	2 153 079
Total	2 069 280	1 622 863	1 917 152	2 110 503	1 610 684	1 936 921	2 065 294	1 551 915	1 885 815

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 21. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah, 2013–2014
(rupiah)

Lapangan Usaha	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 375 646	1 184 763	1 231 925	1 547 590	1 218 351	1 299 491	1 472 630	1 145 669	1 225 675
2	4 340 447	2 257 637	3 248 267	4 135 338	2 152 920	3 214 075	4 112 825	1 900 052	3 099 772
3	1 853 863	1 257 972	1 714 596	1 790 684	1 264 789	1 648 486	1 719 890	1 258 490	1 593 805
4	2 672 665	1 771 993	2 451 300	2 748 458	1 462 327	2 347 584	2 885 854	1 648 699	2 441 991
5	1 868 138	1 377 075	1 715 018	1 932 246	1 421 394	1 744 505	1 993 979	1 441 285	1 797 004
6	1 684 488	1 040 722	1 569 985	1 653 756	1 075 533	1 535 094	1 540 016	1 063 004	1 437 260
7	2 395 690	1 641 847	2 218 747	2 550 541	1 591 934	2 318 860	2 485 679	1 539 916	2 215 624
8	2 905 118	1 617 725	2 734 533	3 072 481	1 719 401	2 863 283	2 992 418	1 623 274	2 760 118
9	2 317 688	1 812 480	2 167 187	2 380 874	1 742 889	2 190 700	2 308 551	1 790 794	2 153 079
Total	2 099 876	1 473 177	1 917 152	2 150 111	1 460 704	1 936 921	2 083 499	1 451 969	1 885 815

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 22. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin,
2013–2014
(rupiah)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 760 158	1 715 254	1 744 918	1 689 067	2 114 199	1 830 632	1 806 821	1 576 408	1 731 183
Sumatera Utara	1 796 854	1 459 316	1 690 673	1 750 799	1 636 505	1 713 219	1 750 767	1 534 584	1 676 004
Sumatera Barat	1 920 934	1 696 073	1 836 979	2 020 001	1 689 190	1 885 696	1 939 195	1 795 816	1 881 098
Riau	2 203 373	1 760 861	2 079 974	2 185 684	1 757 004	2 056 208	2 187 134	2 002 132	2 134 079
Jambi	1 866 765	1 702 608	1 815 850	2 019 994	1 504 208	1 856 211	1 884 525	1 503 491	1 764 244
Sumatera Selatan	1 876 714	1 680 057	1 809 664	1 757 441	1 519 615	1 681 200	1 753 307	1 282 414	1 596 162
Bengkulu	1 988 288	1 615 402	1 852 296	2 102 469	1 641 981	1 920 241	2 064 465	1 578 290	1 867 602
Lampung	1 707 763	1 522 414	1 647 556	1 578 712	1 382 713	1 508 410	1 693 333	1 326 362	1 564 318
Kep. Bangka Belitung	2 064 315	1 588 580	1 925 270	1 991 300	1 581 393	1 862 818	2 087 042	1 566 615	1 933 808
Kepulauan Riau	3 754 400	2 414 290	3 346 460	2 735 452	2 502 164	2 663 313	2 828 017	2 561 745	2 744 863
DKI Jakarta	3 139 500	2 452 365	2 896 397	3 410 285	2 620 359	3 114 110	3 170 590	2 384 748	2 871 802
Jawa Barat	1 992 614	1 683 209	1 896 604	2 068 555	1 518 462	1 903 061	2 070 636	1 515 986	1 900 760
Jawa Tengah	1 526 880	1 108 929	1 361 325	1 561 922	1 104 665	1 378 291	1 557 914	1 109 196	1 378 134
DI Yogyakarta	1 846 131	1 433 104	1 673 646	1 804 141	1 426 826	1 643 355	1 896 435	1 446 697	1 690 938
Jawa Timur	1 667 815	1 270 642	1 522 205	1 720 335	1 284 567	1 554 598	1 673 407	1 196 316	1 490 826
Banten	2 537 784	2 060 932	2 383 237	2 917 798	2 130 247	2 653 642	2 571 199	1 943 546	2 366 672
Bali	2 049 142	1 574 678	1 868 875	2 022 427	1 614 841	1 864 121	2 086 253	1 588 813	1 883 179
Nusa Tenggara Barat	2 025 460	1 437 490	1 802 835	1 879 704	1 299 947	1 659 241	1 808 685	1 469 797	1 692 031
Nusa Tenggara Timur	1 848 806	1 650 605	1 782 369	1 761 682	1 662 375	1 729 642	1 841 382	1 678 586	1 784 355
Kalimantan Barat	2 065 378	1 661 225	1 949 435	1 867 943	1 537 606	1 778 094	1 931 814	1 577 399	1 831 499
Kalimantan Tengah	2 173 661	1 832 959	2 079 336	2 255 864	1 776 940	2 115 727	2 177 724	1 794 736	2 065 872
Kalimantan Selatan	2 321 835	1 692 862	2 135 104	2 506 283	1 651 280	2 260 043	2 444 596	1 411 412	2 149 149
Kalimantan Timur	3 035 317	2 056 792	2 785 468	3 108 460	2 270 138	2 879 787	3 090 285	2 139 938	2 823 438
Sulawesi Utara	2 094 456	2 182 591	2 123 768	2 079 329	2 155 354	2 104 721	1 906 266	2 410 320	2 077 495
Sulawesi Tengah	2 018 156	1 665 451	1 889 968	2 065 488	1 540 264	1 870 895	1 985 523	1 548 577	1 831 205
Sulawesi Selatan	2 086 278	1 724 899	1 952 381	1 976 164	1 494 906	1 796 007	2 078 912	1 561 014	1 887 418
Sulawesi Tenggara	2 091 616	1 746 846	1 976 253	2 252 263	1 654 096	2 033 843	2 193 690	1 700 497	2 017 945
Gorontalo	1 743 992	1 547 391	1 660 065	1 768 843	1 653 778	1 716 285	1 624 520	1 583 986	1 606 871
Sulawesi Barat	2 239 625	1 633 201	2 030 975	1 647 948	1 243 559	1 510 110	1 843 822	1 568 252	1 749 757
Maluku	2 467 220	1 974 281	2 288 093	2 228 036	1 795 803	2 070 155	2 116 910	1 886 466	2 036 042
Maluku Utara	2 301 942	1 862 721	2 158 043	1 980 353	2 238 238	2 056 927	2 041 210	2 109 350	2 061 758
Papua Barat	2 920 190	2 220 380	2 718 881	2 823 735	2 391 832	2 699 870	3 004 801	1 988 494	2 729 619
Papua	3 276 418	2 612 683	3 117 185	3 184 008	2 501 291	3 013 492	2 978 830	2 465 210	2 847 628
Indonesia	2 069 280	1 622 863	1 917 152	2 110 503	1 610 684	1 936 921	2 065 294	1 551 915	1 885 815

Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah,
2013–2014
(rupiah)

Provinsi	Agustus 2013			November 2013			Februari 2014		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 115 664	1 478 439	1 744 918	2 296 804	1 511 845	1 830 632	2 062 616	1 510 909	1 731 183
Sumatera Utara	1 787 434	1 490 103	1 690 673	1 838 039	1 433 979	1 713 219	1 763 002	1 475 881	1 676 004
Sumatera Barat	2 020 851	1 607 621	1 836 979	2 126 496	1 590 534	1 885 696	2 077 620	1 640 093	1 881 098
Riau	2 423 813	1 709 595	2 079 974	2 308 041	1 759 418	2 056 208	2 465 641	1 742 852	2 134 079
Jambi	2 267 257	1 481 173	1 815 850	2 257 426	1 618 616	1 856 211	2 189 906	1 491 377	1 764 244
Sumatera Selatan	2 180 146	1 313 520	1 809 664	1 843 377	1 497 997	1 681 200	1 826 174	1 360 969	1 596 162
Bengkulu	2 139 889	1 563 562	1 852 296	2 384 246	1 424 365	1 920 241	2 192 171	1 535 217	1 867 602
Lampung	2 032 381	1 317 154	1 647 556	1 845 883	1 268 838	1 508 410	2 022 925	1 225 356	1 564 318
Kep. Bangka Belitung	2 075 304	1 701 220	1 925 270	1 929 395	1 776 128	1 862 818	2 095 350	1 700 805	1 933 808
Kepulauan Riau	3 483 600	1 810 777	3 346 460	2 685 533	2 443 013	2 663 313	2 838 138	1 844 900	2 744 863
DKI Jakarta	2 896 397		2 896 397	3 114 110		3 114 110	2 871 802		2 871 802
Jawa Barat	2 007 676	1 367 960	1 896 604	2 030 892	1 351 172	1 903 061	2 022 626	1 386 039	1 900 760
Jawa Tengah	1 444 593	1 208 863	1 361 325	1 510 440	1 153 732	1 378 291	1 467 970	1 240 351	1 378 134
DI Yogyakarta	1 746 063	1 385 733	1 673 646	1 669 243	1 557 404	1 643 355	1 773 427	1 419 393	1 690 938
Jawa Timur	1 656 489	1 213 138	1 522 205	1 737 971	1 192 496	1 554 598	1 651 212	1 152 983	1 490 826
Banten	2 512 000	1 601 984	2 383 237	2 854 730	1 571 716	2 653 642	2 540 565	1 536 380	2 366 672
Bali	1 966 743	1 586 565	1 868 875	1 968 059	1 577 442	1 864 121	1 982 494	1 631 901	1 883 179
Nusa Tenggara Barat	1 968 157	1 520 072	1 802 835	1 831 390	1 390 817	1 659 241	1 927 643	1 320 942	1 692 031
Nusa Tenggara Timur	2 171 986	1 444 671	1 782 369	2 078 141	1 452 943	1 729 642	2 202 896	1 448 533	1 784 355
Kalimantan Barat	2 149 469	1 731 859	1 949 435	1 998 613	1 566 815	1 778 094	2 054 009	1 614 026	1 831 499
Kalimantan Tengah	2 249 789	1 947 282	2 079 336	2 366 164	1 948 967	2 115 727	2 222 622	1 967 142	2 065 872
Kalimantan Selatan	2 163 289	2 097 544	2 135 104	2 212 549	2 327 610	2 260 043	2 184 921	2 100 019	2 149 149
Kalimantan Timur	3 049 736	2 156 280	2 785 468	2 971 282	2 632 277	2 879 787	3 075 879	2 171 259	2 823 438
Sulawesi Utara	2 251 725	1 892 179	2 123 768	2 202 545	1 947 580	2 104 721	2 249 806	1 772 864	2 077 495
Sulawesi Tengah	2 244 340	1 536 753	1 889 968	2 450 764	1 480 648	1 870 895	2 224 630	1 561 568	1 831 205
Sulawesi Selatan	2 239 262	1 524 509	1 952 381	2 096 058	1 424 269	1 796 007	2 156 733	1 524 952	1 887 418
Sulawesi Tenggara	2 299 134	1 717 133	1 976 253	2 192 680	1 874 099	2 033 843	2 301 083	1 726 920	2 017 945
Gorontalo	1 954 325	1 326 879	1 660 065	2 065 069	1 329 674	1 716 285	1 862 167	1 347 513	1 606 871
Sulawesi Barat	2 025 621	2 034 274	2 030 975	1 928 924	1 210 240	1 510 110	2 032 646	1 581 976	1 749 757
Maluku	2 651 178	1 682 982	2 288 093	2 308 052	1 703 441	2 070 155	2 247 200	1 714 500	2 036 042
Maluku Utara	2 274 276	2 055 832	2 158 043	2 110 507	2 011 051	2 056 927	2 278 030	1 916 359	2 061 758
Papua Barat	2 671 670	2 752 525	2 718 881	2 601 341	2 786 273	2 699 870	2 747 086	2 714 311	2 729 619
Papua	3 316 519	2 736 907	3 117 185	3 356 835	2 382 964	3 013 492	3 033 472	2 510 532	2 847 628
Indonesia	2 099 876	1 473 177	1 917 152	2 150 111	1 460 704	1 936 921	2 083 499	1 451 969	1 885 815

Lampiran 24. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsq@bps.go.id

